



**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMISKINAN MELALUI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**MUHAMMAD APRIL
1515210129**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel intervening di kota medan. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau time series yaitu tahun 2001 sampai 2017. Model analisa data dalam penelitian ini adalah dengan CFA (*CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS*) dan *Path Analysis* (Analisis Jalur) dimana hasil dari CFA dari 7 variabel bebas yg di uji yaitu UMR, Inflasi, pendidikan, PDRB, jumlah penduduk, investasi, Tenaga Kerja, terdapat 2 variabel yang terpilih dalam mempengaruhi Kemiskinan yaitu variabel UMR dan pendidikan. Hasil *Path Analysis* menunjukkan UMR berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan melalui TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA sebagai variabel intervening kerana besarnya pengaruh tidak langsung dibandingkan pengaruh langsung, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan melalui TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA sebagai variabel intervening kerana besarnya pengaruh tidak langsung dibandingkan pengaruh langsung, dari hasil tersebut dua variabel yaitu UMR dan pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan melalui TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA sebagai variabel intervening.

Kata kunci : UMR, Inflasi, pendidikan, PDRB, jumlah penduduk, investasi, Tenaga Kerja, pengangguran, kemiskinan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the poverty rate seen from the level of open unemployment as an intervening variable in the city of Medan. This study uses secondary data or time series from 2001 to 2017. Data analysis models in this study are CFA (COMFIRMATORY FACTOR ANALYSIS) and Path Analysis where the results of the CFA of the 7 independent variables tested are UMR, Inflation , education, GRDP, population, investment, labor, there are 2 variables selected in influencing poverty, namely the UMR variable and education. The Path Analysis result shows that the UMR has a significant effect on poverty level through OPEN UNEMPLOYMENT LEVEL as an intervening variable because of the magnitude of the indirect effect compared to the direct effect, education has a significant effect on poverty level through the OPEN UNEMPLOYMENT LEVEL as an intervening variable because of the magnitude of the indirect effect compared to the direct effect The two variables, namely the minimum wage and education that have a significant effect on poverty levels through the OPEN UNEMPLOYMENT LEVEL as an intervening variable.

Keywords: UMR, Inflation, education, GRDP, population, investment, Labor, unemployment, poverty.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
.....	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	12
1. Kemiskinan	12
a. Teori Kemiskinan.....	13
b. Jenis Kemiskinan	13
c. Ukuran Kemiskinan	16
d. Penyebab Kemiskinan.....	17
2. Pengangguran.....	17
a. Jenis Pengangguran.....	18
b. Penyebab Pengangguran	23
3. Upah Minimum Regional (UMR).....	23
4. Inflasi	26
a. Jenis-jenis Inflasi	27
b. Teori Inflasi.....	28
c. Penyebab Inflasi.....	29
5. Pendidikan.....	30
a. Jenis Pendidikan.....	30
b. Tingkat Pendidikan Tertinggi	31
c. Manfaat Pendidikan	31
6. Produk perKapita atau PDRB per Kapita	32
7. Jumlah Penduduk	33
a. Pengertian Jumlah Penduduk.....	33
b. Jumlah Penduduk dan Kemiskinan.....	36
8. Investasi	38
a. Pengertian Investasi	38

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi	40
9. Tenaga Kerja	42
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Konseptual	49
D. Hipotesis Penelitian.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian	52
C. Definisi Operasional Variabel.....	55
D. Jenis Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	56
1. Model CFA (Confirmatory Factor Analysis).....	56
2. Model Analisis Jalur (Path Analysis).....	57
3. Pengujian Asumsi Klasik	59
a. Uji Normalitas	59
b. Uji Multikolinieritas	59
c. Uji Autokorelasi	60

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Hasil penelitian.....	61
1. kemiskinan di sumatera utara.....	61
2.perkembangan variabel penelitian	61
3.Hasil uji cfa	63
4.Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	72
a Uji Normalitas Data.....	79
b Uji Multikolinearitas	80
c Uji Autokorelasi	81
5.Hasil Analisis Path Analysis	82
a Pengaruh UMR Terhadap kemiskinan Pengguguran Sebagai Variabel Intervening	83
b Pengaruh pendidikan Terhadap kemiskinan Melalui pengguguran Sebagai Variabel Intervening	84
B. PEMBAHASAN	86
1.Analisis pengaruh UMR Terhadap kemiskinan Dengan pengguguran Menjadi Variabel Intervening	88
2.Analisis Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan Dengan pengguguran Menjadi Variabel Intervening ..	91

BAB IV METODE PENELITIAN

A. KESIMPULAN	94
B. SARAN	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumut Tahun 2001 s/d 2017	3
Gambar 1.2: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumut Tahun 2001 s/d 2017	7
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual <i>Confirmatory Factor Analysis</i>	49
Gambar 2.2 : Kerangka <i>Konseptual Path Analysis</i>	50
Gambar4.1: scree plot	75
Gambar 4.2: kerangka konseptual path analysis	78
Gambar 4.3: histogram.....	79
Gambar 4.4: Normal p.p plot	80
Gambar4.5: Path Analisis Pengaruh Antara UMR Terhadap pengangguran dan kemiskinan.....	83
Gambar4.6:Path Analisis Pengaruh Antara jumlah pendidikan Terhadap kemiskinan melalui pengangguran Sebagai Variabel Intervening.....	84

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2001 – 2017	3
Tabel 1.2: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara Tahun 2001 – 2017	6
Tabel 1.3: Mapping Keaslian Penelitian	11
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1: Rencana Waktu Penelitian	53
Tabel 3.2: Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 4.1: Data tingkat kemiskinan 2001-2017	63
tabel 4.2: Data tingkat pengangguran terbuka tahun 2001-2017	64
tabel 4.3: Data upah minimum regional tahun 2001-2017	65
tabel 4.4: Data tingkat inflasi tahun 2001-2017	66
tabel 4.5: Data tingkat pendidikan tahun 2001-2017	67
tabel 4.6: Data PDRB tahun 2001-2017.....	68
tabel 4.7: Data tingkat penduduk tahun 2001-2017	69
tabel 4.8: Data investasi sumatra utara tahun 2001-2017	70
tabel 4.9: Data tenaga kerja tahun 2001-2017.....	71
Tabel 4.10: KMO and Bartlett's Tes	72
Tabel 4.11: Communalities	73
Tabel 4.12: Total variance Explained	74
Tabel 4.13: Component Matrixa	75
hTabel 4.14: Rotated Component Matrixa.....	76

Tabel 4.15: Component Transformation Matrix	77
Tabel 4.16: Coefficients(a).....	78
Tabel 4.17: Model Summary(b).....	81
Tabel 4.18: persamaan 1 Coefficientsa	81
Tabel 4.19: persamaan 2 Coefficientsa	82
Tabel 4.20: persamaan 3 Coefficientsa	82
Tabel 4.21: persamaan 4 Coefficientsa	83

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan kepada penulis karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang di susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai sang motivator dan inspirator terhebat sepanjang zaman. Adapun judul yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : ***“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Melalui Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Utara”***.

Penulis menyadari banyak kesalahan yang terjadi pada skripsi ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk ini, maka dari segala kerendahan hati mengharapkan bantuan dan bimbingan dari semua pihak guna kesempurnaannya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak DR.E Bakhtiar Efendi S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang turut memberikan kemudahan dan semangat untuk penulisan skripsi ini.

4. Ibu Ade Novalina S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan arahan, motivasi, serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rahmad Sembiring S.E., M.SP selaku dosen pembimbing II penulis yang memberikan banyak masukan, arahan, motivasi, serta kemudahan di dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai departemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Irman Pili dan Ibunda Ermawati Chan beserta adik-adikku yang selalu memberikan semangat & Doa serta pengorbanan moril, materil yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
8. Kepada Pasangan saya yang terkasih Mia Audina S.E., yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya.
9. Serta semua sahabat-sahabatku yang selalu membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dengan selesainya skripsi ini agar kiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh penulis maupun oleh pembaca yang kiranya nantinya akan membaca isi dari skripsi ini.

Medan, Oktober 2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu di lihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini di picu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus imigrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan pengangguran menjadi sangat kompleks. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan ke pada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah di tetapkan melalauai pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan jumlah penduduk miskin. efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam dalam memilih strategi pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Ravi Dwi Wijayanto, 2010). Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap di tindak lanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit Pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja. (Hureirah; 2005).

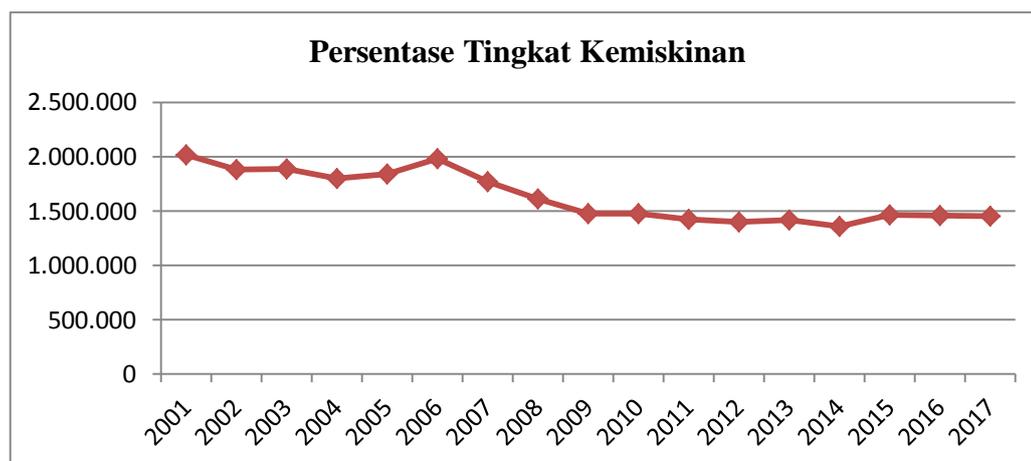
Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Sumatera Utara menempati posisi ke empat dalam angka kepadatan penduduk setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Disamping adanya permasalahan angka kepadatan penduduk,

Sumatera Utara Juga dihadapkan dengan tingginya kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berfluktuasi dari tahun 2001-2017. Berikut ini jumlah dan presentase penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2001 - 2017.

Tabel 1.1: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2001 – 2017

No	Tahun	Jumah penduduk miskin Sumatera Utara (Jiwa)	Presentase tingkat kemiskinan Sumatera Utara (%)
1	2001	2.017.000	17,21
2	2002	1.883.900	15.84
3	2003	1.889.400	15.89
4	2004	1.800.100	14.93
5	2005	1.840.200	14.68
6	2006	1.979.700	15.66
7	2007	1.768.500	13.90
8	2008	1.611.510	12.47
9	2009	1.474.230	11.27
10	2010	1.477.100	11.36
11	2011	1.421.440	10.83
12	2012	1.400.450	10.41
13	2013	1.416.370	10.39
14	2014	1.360.600	9.85
15	2015	1.463.660	10.53
16	2016	1.455.950	10.35
17	2017	1.453.870	10.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara



Gambar 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumut tahun 2001 s/d 2017
Sumber : Tabel 1.1

Dari tabel dan grafik di atas di jelaskan bahwa presentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2001 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana jumlah penduduk miskin paling tinggi Pada tahun 2001 sebanyak 2.017.000 jiwa. dengan presentase tingkat kemiskinan sebesar 17,21%. Dan jumlah penduduk miskin terendah Pada tahun 2014, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.360.600 jiwa dengan presentase tingkat kemiskinan sebesar 9,85 %.

Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan di katakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin akan semakin sedikit. Untuk itu pemerintah dengan berbagai program berupaya menanggulangi kemiskinan namun disadari bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil maksimal dan belum sesuai dengan harapan. Kompleksnya masalah kemiskinan disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya kemiskinan. Sebagai masalah yang bersifat multidimensional, kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan tidaklah mudah. Banyak faktor yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap kondisi kemiskinan. persentase kemiskinan memang turun dari tahun ke tahun. (BPS;2009)

Agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah harus meletakkan kemiskinan menjadi pusat perhatian, beberapa ahli menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi PDRB daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yacoub, 2012). Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru

sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat berkurangnya kemiskinan.

Disisi lain pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran, setengah menganggur, atau kurangnya lahan produktif sebagai aset penghasil pendapatan merupakan hal yang akut bagi masyarakat miskin ketika dalam memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makanan, air, dan tempat tinggal adalah hal yang harus diperjuangkan setiap harinya.

Tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah dapat menggambarkan bagaimana keadaan tenaga kerja di daerah tersebut. Di negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya di ikuti oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi akan tetapi diikuti juga oleh semakin berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di negara tersebut.

Menurut Todaro (2000) pembangunan ekonomi sebuah negara dapat di lihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak di imbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

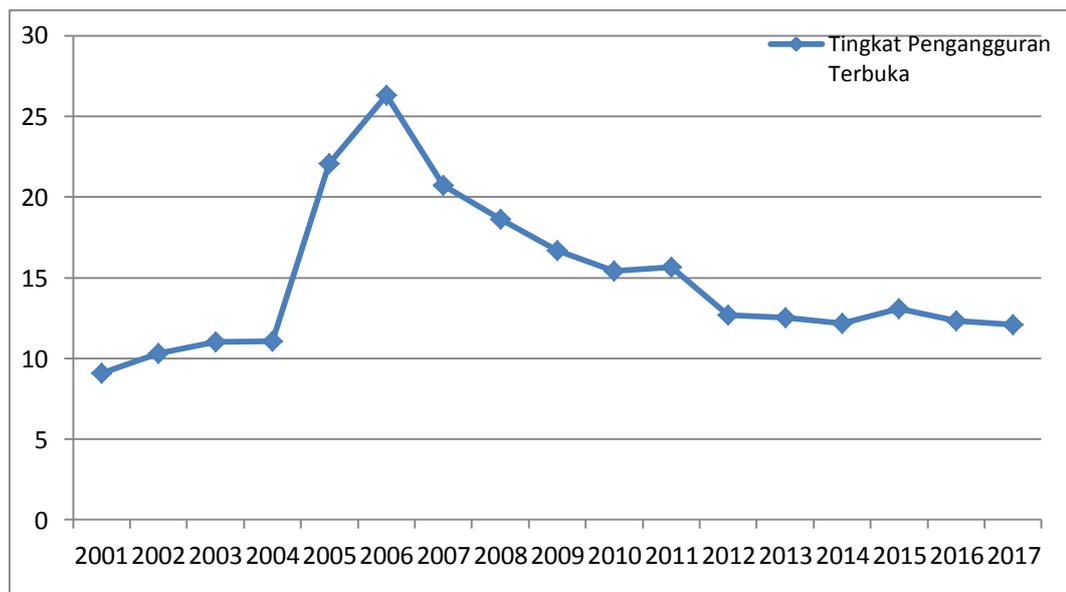
Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara secara persentase berfluktuasi selama periode 2001 hingga 2017. Angka pengangguran ini relative tinggi dan hal ini masih perlu menjadi perhatian baik yang berkaitan

langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial maupun untuk mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan dasar pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah mendorong terciptanya lapangan kerja baru terutama salah satunya melalui penanaman modal. Namun demikian, jumlah angkatan kerja yang begitu tinggi dan tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan tidak tertampungnya seluruh angkatan kerja yang ada. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa yang akan datang seharusnya lebih menitikberatkan dan meningkatkan anggaran di bidang ekonomi dan investasi di samping bidang-bidang yang lainnya. Berikut ini persentase tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara tahun 2001 – 2017:

Tabel 1.2: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara Tahun 2001 – 2017

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara (%)
1	2001	9,09
2	2002	10,30
3	2003	11,02
4	2004	11,08
5	2005	22,08
6	2006	26,33
7	2007	20,73
8	2008	18,65
9	2009	16,70
10	2010	15,44
11	2011	15,65
12	2012	12,71
13	2013	12,54
14	2014	12,16
15	2015	13,10
16	2016	12,33
17	2017	12,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara



Gambar 1.2 : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumut Tahun 2001 s/d 2017
Sumber : Tabel 1.2

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di mulai dari tahun 2001 sebesar 9,09 % sampai Pada tahun 2017 sebesar 12,10%. Persentase tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dalam tabel tersebut pada tahun 2006, dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai 26,33%. Sementara tingkat pengangguran terbuka di tahun 2001 merupakan tahun dengan tingkat pengangguran terbuka terendah dalam tabel tersebut , yaitu sebesar 9,09%.

Tingginya angka pengangguran biasanya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun tingginya kriteria rekrutmen penawaran kesempatan kerja yang ada. Saat ini banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan pendidikan minimal diploma ataupun sarjana. Keadaan ini membuat sebagian penduduk tidak mampu dan tidak memiliki kesempatan memasuki dunia kerja. Jumlah penduduk yang semakin tinggi juga

menjadi salah satu faktor semakin tingginya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Fenomena masalah dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas melalui Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi Tingkat Kemiskinan secara langsung dan tidak langsung di Provinsi Sumatera Utara periode penelitian (2001 s/d 2017) .

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara cenderung berfluktuasi dari tahun 2001 hingga 2017. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 17,21% , sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada tahun 2001 cenderung rendah yaitu sebesar 9,09 %.
- b. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara cenderung berfluktuasi dari tahun 2001 hingga 2017. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 26,33%, dapat berdampak Pada peningkatan Jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan .
- c. Penurunan tingkat kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan tingkat pengangguran Terbuka pada periode yang sama dan sesudahnya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan Model *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*, *Path Analysis*, dengan variabel bebas UMR, Inflasi, Pendidikan, PDRB, Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Investasi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas penulis adalah :

- a. Menganalisis faktor manakah (UMR, inflasi, pendidikan, PDRB, jumlah penduduk, Tenaga kerja, investasi) yang relevan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
- b. Apakah faktor-faktor yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel intervening?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui antara lain, yaitu :

- a. Untuk menganalisa faktor manakah (UMR, Inflasi, pendidikan, PDRB, jumlah penduduk, investasi, Tenaga Kerja) relevan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

- b. Untuk menganalisa faktor-faktor yang sudah terpilih merupakan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel intervening?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah, yaitu :

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai fenomena kemiskinan dan pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara

- b. Bagi peneliti berikutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih jauh terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

- c. Bagi Universitas dan Fakultas

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Restuty Anggereny Rumahorbo dengan judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Regresi Linear Berganda, sedangkan penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun perbedaan penelitian dapat di lihat Pada tabel mapping keaslian penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Mapping Keaslian Penelitian

No	Keterangan	Peneliti terdahulu (Restuty Anggereny Rumahorbo) Universitas Hasanuddin Makassar	Peneliti sekarang (Muhammad April) Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan
1	Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara
2	Variabel	Variabel X yang di tinjau dari Pertumbuhan Ekonomi (X1) PDRB (X2) Inflasi (X3) Pengangguran (X4) Variabel Y (Jumlah penduduk miskin)	Variabel X yang di tinjau dari (X1) UMR (X2) Inflasi (X3) Pendidikan (X4) PDRB (X5) Jumlah Penduduk (X6) Pendidikan (X7) Tenaga Kerja Variabel Y ditinjau dari (Y1) Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) kemiskinan.
3	Mtode	regresi linear berganda.	Dengan menggunakan model CFA (<i>confirmatory Factor Analysis</i> dan <i>Path Analysis</i>).
4	Tempat	Di Provinsi Sumatera Utara.	Di Provinsi Sumatera Utara.
5	Tahun	2014	2018

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Menurut Elvira (2018), menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Menurut Noviyanto (2017), menjelaskan bahwa penduduk dikatakan miskin apabila mencapai 1.900 kalori plus kebutuhan dasar non makanan atau setara dengan Rp.120.000,- per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1.900 sampai 2.100 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.150.000,- per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2.100 sampai 2.300 kalori plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.175.000,- per orang perbulan.

a. Teori Kemiskinan

Menurut Prihatini (2006), indikator kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan dan ekonomi (konsumsi per kapita). Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak maka diperlukan tolak ukur yang jelas. Berbagai pendekatan atau konsep digunakan sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas kemiskinan.

b. Jenis Kemiskinan

Menurut Abdiyanto (2016:26), kemiskinan dibagi dalam tiga bentuk, yaitu: kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni, makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya; kemiskinan relatif adalah kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan; kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang

belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan structural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Suryawati dalam Elvira (2018), mengungkapkan bahwa kemiskinan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Kemiskinan Absolut, suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.
- 2) Kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
- 3) Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari

budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain..

- 4) Kemiskinan struktural, kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Suryawati dalam Elvira (2018), menjelaskan bahwa ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini dipakai untuk menentukan kondisi miskin yaitu:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
- 4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area).
- 5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Menurut Suryawati (2005), kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu; kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus serta; kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

c. Ukuran Kemiskinan

Bank dunia membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) mengukur kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 perhari masuk dalam kategori miskin. Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan indeks perkepala (*head counts index*) yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

d. Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2004), mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia; ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Samuelson dan Nourdhus (2004) bahwa penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan.

2. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2010: 472). Sedangkan pada Sumarsono (2009: 259) pengangguran adalah seseorang atau lebih yang berada dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau secara aktif sedang dalam pencarian pekerjaan.

Ketidak seimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja berdampak pada perekonomian suatu negara, Todaro (2010:320), sebagian besar pengangguran adalah merupakan kelompok masyarakat paling miskin, yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang bekerja secara musiman. Namun tidak setiap orang yang tidak bekerja pasti miskin, selalu saja ditemukan pengangguran sukarela di negara berkembang, yaitu yang dengan mudah dapat memperoleh pekerjaan yang baik, tapi memilih menganggur karena jenis pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan, kualifikasi kecakapan, aspirasi pribadi, target finansial maupun standar gengsi.

a. Jenis Pengangguran

Pengangguran menurut *World Bank* merupakan individu yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Jenis-jenis pengangguran menurut Sukirno (2010) berdasarkan keadaan yang menyebabkan, yaitu :

1) Pengangguran friksional

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan karena seseorang meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan keinginannya.

2) Pengangguran struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi. Penyebab terjadinya pengangguran struktural antara lain, yaitu :

a) Teknologi semakin berkembang

Teknologi semakin berkembang mengakibatkan tenaga kerja manusia berpindah kepada tenaga mesin, dikarenakan tenaga kerja mesin lebih efisien dan murah, terlebih lagi permintaan akan barang produksi industri yang semakin meningkat membuat produsen mengganti tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin.

b) Persaingan global

Persaingan global atau luar negeri dimana produk luar negeri lebih murah dan lebih baik dibandingkan dengan produksi lokal baik karena produksi luar negeri yang lebih efisien ataupun adanya kebijakan luar negeri yang menyebabkan barang luar negeri lebih murah dibandingkan produk lokal. Hal ini mengakibatkan permintaan akan produk lokal semakin menurun. Produksi industri lokal menjadi tidak

mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga mengalami kebangkrutan, yang pada akhirnya akan memunculkan pengangguran.

c) Kemunduran perekonomian

Kemunduran perekonomian dalam suatu daerah dikarenakan adanya kemajuan perekonomian yang pesat di daerah lain, sehingga antar daerah tidak mampu bersaing, pada akhirnya daerah yang tidak mampu bersaing akan menghasilkan pengangguran.

3) Pengangguran alamiah

Pengangguran alamiah merupakan pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh merupakan keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5 persen inilah yang dikatakan sebagai pengangguran alami.

4) Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang melebihi pengangguran ilmiah. Secara umum pengangguran konjungtur terjadi akibat adanya pengurangan permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat menyebabkan perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja ataupun harus tutup usaha, sehingga memunculkan pengangguran konjungtur.

Sedangkan jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya, antara lain

yaitu :

1) Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang terjadi karena semakin bertambahnya pertumbuhan tenaga kerja dan masih sedikitnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pengangguran terbuka merupakan penduduk yang sudah memasuki usia angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (laporan Sosial Indonesia, 2007)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPT} = (\text{Pencari Kerja/Angkatan Kerja}) \times 100 \%$$

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan. Oleh karena itu, indikator TPT selalu diumumkan setiap tahun pada pidato presiden tanggal 16 Agustus sebagai bukti kinerja Pemerintah Indonesia. Secara spesifik, tingkat pengangguran terbuka dalam sakernas, terdiri atas:

- a) Mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan,
- b) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha,
- c) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum bekerja.

2) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran dimana suatu kegiatan ekonomi (kegiatan produksi) yang dilakukan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi jumlah yang seharusnya atau melebihi standart yang ada. Pengangguran ini biasanya terjadi pada lembaga atau organisasi dimana suatu pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh satu orang, namun diposisikan sendiri kepada orang lain, sehingga menjadi tidak efektif.

3) Pengangguran musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran dimana pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian, dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan jeda antara musim tanam dan musim panen.

4) Pengangguran setengah menganggur

Pengangguran setengah menganggur merupakan pengangguran dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jam tenaga kerja normal di Indonesia yaitu 35

jam/minggu, sehingga tenaga kerja yang bekerja dibawah 35 jam/minggu masuk kedalam golongan setengah menganggur.

Landasan teori tentang pengangguran yang ada dalam penelitian ini menggunakan konsep teori pengangguran menurut *World Bank* merupakan individu yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Pengukuran pengangguran dalam penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka provinsi-provinsi di Indonesia. Pengangguran mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal apabila penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Pengangguran yang ada dalam masyarakat menghambat pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal, sehingga menurunkan kemakmuran yang harusnya mampu dicapai. Dengan demikian masyarakat yang menganggur akan meningkatkan peluang memasuki kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Dengan demikian, pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan, semakin banyak masyarakat yang menganggur, maka akan cenderung semakin banyak pula kemiskinan dalam masyarakat.

b. Penyebab Pengangguran

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. keadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluarannya. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan

masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno; 2004).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut: 1). Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja yang tersedia; 2). Struktur Lapangan kerja tidak seimbang; 3). Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik tidak seimbang; 4). Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh angkatan kerja indonesia; 5). Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang (Sadono, Sukirno; 2004).

3. Upah Minimum Regional (UMR)

Upah minimum adalah upah terendah yang harus diterima setiap kali seseorang bekerja pada orang lain. Pasal 92 No. 12 tahun 2005 memberi amanat kepada perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.. Kebijakan pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah sangat diharapkan agar tidak terjadinya kesenjangan antara pekerja disetiap level dan sekaligus mencegah kecemburuan antar sesama pekerja (Jihani, 2008:17).

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut:

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang akan diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau

ambil barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunya target produksi, mengakibatkan kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.

- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaa mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effects*).

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada tiga fungsi upah yaitu:

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya
2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja sekarang
3. Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktifitas kerja.

Sistem pengganjian di Indonesia berbeda-beda bagi pekerja, karena pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada tamatan pendidikan dan pengalaman kerja. sistim pengupahan di Indonesia mempunyai beberapa masalah yaitu:

1. Masalah pertama bahwa pengusaha dan karyawan pada umumnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai upah. bagi pengusaha upah,

dipandang sebagai beban, karena semakin besar upah yang dibayarkan pada karyawan, semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha, di pihak lain, karyawan dan keluarga biasanya menganggap upah dalam bentuk uang.

2. Masalah kedua dalam di bidang pengupahan berhubungan dengan keragaman sistim pengupahan dan besarnya ketidakseragaman antara perusahaan. Sehingga kesulitan sering ditemukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional, misalnya dalam hal menentukan pajak pendapatan, upah minimum, upah lembur dan lain-lain.
3. Masalah ketiga yang dihadapi dalam bidang pengupahan adalah rendahnya tingkat upah atau pendapatan masyarakat.

Banyak karyawan yang berpenghasilan rendah bahkan lebih rendah dari kebutuhan fisik minimumnya yang menyebabkan rendahnya terhadap tingkat upah pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu pertama rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha dimana tingkat kemampuan manajemen yang rendah menimbulkan banyak keborosan dana sumber- sumber dan waktu yang terbuang percuma. akibatnya karyawan tidak dapat bekerja dengan efisien dan biaya produksi perunit menjadi besar. Dengan demikian pengusaha tidak mampu membayar upah yang tinggi. penyebab kedua rendahnya produktivitas kerja karyawan sehingga pengusaha memberi imbalan dalam bentuk upah yang rendah juga. akan tetapi rendahnya produktivitas kerja ini justru dalam banyak hal diakibatkan oleh tingkat penghasilan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian yang kurang, serta nilai gizi yang juga rendah.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut diatas sebagai pemecahannya pemerintah telah mengembangkan penerapan upah minimum itu paling sedikit cukup menutupi kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya.

4. Inflasi

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Ada beberapa jenis inflasi berdasarkan sifatnya (Riri, 2016) :

- a. Inflasi Ringan (<10% setahun), ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif.
- b. Inflasi Sedang (10% - 30% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.
- c. Inflasi Berat (30% - 100% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.
- d. Hiper Inflasi (>100% setahun), dimana inflasi ini paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang. Inflasi dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

$$I_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

I_n = Inflasi pada bulan ke-n

IHK_n = IHK pada bulan ke-n

$IHK_n - 1$ = IHK pada bulan ke-(n-1)

a. Jenis-jenis Inflasi

Secara umum ada tiga jenis indeks harga yaitu : Indeks Harga Konsumen (INK) adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, perawatan, kesehatan dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari; Indeks Harga Produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku, produk antara peralatan modal, dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan, serta GNP Deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dengan GNP riil dikaitkan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar, sedangkan GNP nominal adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga berlaku, (Nanga; 2001).

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam negara satu untuk waktu yang berbeda. Atas dasar jenisnya inflasi dibagi dalam tiga kategori: Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*), yaitu inflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang rendah kurang dari 10% per tahun. kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase kecil serta dalam jangka waktu

yang relatif lama; Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), (Randal dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya sampai double digit dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi; Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik samapi 5 atau 6 kali.

b. Teori Inflasi

Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*. (Nopirin; 2008).

Disamping itu menurut (Greene dan Pillanueva; 2001), tingkat inflasi yang tinggi serig dinyatakan ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasanya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului harga upah, sehingga keuntungan perusahaan naik. Namun apabila laju inflasi itu cukup tinggi (Hiper inflasi) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yaitu penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunya produksi barang. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi juga bisa dibarengi

dengan penurunan output. Tetapi dalam keadaan yang pernah terjadi biasanya nilai inflasi lebih besar akan menaikkan output, dan itu akan membuat pengusaha atau perusahaan untuk berinvestasi atau menanamkan modal mereka.

c. Penyebab Inflasi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi : *Demand Full Inflation* .timbul terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut; *Cost Push Inflation* terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan –penwaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. (Samuelson dan Nordhaus; 2004).

Sedangkan Faktor-Faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh Demand pull Inflation dan Cost Push Inflation tetapi juga dipengaruhi oleh : 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*) yaitu disebabkan adanya peristiwa ekonomi dalam negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus menerus, kemudian pemerintah memerintahkan Bank Indonesia untuk mencetak Uang baru dalam jumlah besar;

2) Inflasi yang tertular dari luar negeri (*Imported Inflation*) yaitu penularan melalui harga barang impor. inflasi ini umumnya terjadi di negara berkembang yang mana sebagian besar bahan baku dari peralatan dalam unit produksinya berasal dari luar negeri. (Samuelson dan Nordhaus; 2004).

Masalah inflasi adalah masalah yang terus menerus mendapat perhatian pemerintah. Adapun yang menjadi tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan persentase perubahan sebuah indeks harga. (Sadono, Sukirno; 2006)

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia, melalui pendidikan seseorang mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur hidupnya secara wajar pendidikan dapat mengubah pola seseorang, dimana melalui pendidikan seseorang banyak memperoleh pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Melalui pendidikan seseorang dapat bersosialisasi secara baik dalam lingkungannya (Fitriana, 2008).

a. Jenis Pendidikan

Pendidikan di Indonesia mempunyai banyak jenis, mulai dari pendidikan formal, nonformal dan informal. pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan setaraf denganya. Pendidikan nonformal adalah proses berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan

dengan tetangga, pasar, perpustakaan dan media massa. Pendidikan Informal adalah diluar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri, atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya (Fitriana, 2008).

b. Tingkat Pendidikan Tertinggi

Tingkat Pendidikan Tertinggi atau disingkat TPT adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah di tamatkan. TPT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah (Fitriana, 2008).

c. Manfaat Pendidikan

Menurut Fitriana, (2008). Manfaat Pendidikan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Manfaat pribadi atau manfaat ekonomi yang di peroleh seseorang secara langsung, sebagai contoh manfaat pribadi pendidikan adalah manfaat yang diperoleh peserta didik dan keluarganya.
- 2) Manfaat sosial pendidikan atau manfaat yang diperoleh dari orang-orang berpendidikan, mencakup juga manfaat yang diperoleh orang lain atau bahkan masyarakat secara keseluruhan seperti manfaat lebih banyaknya tenaga kerja.

6. produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (*Robinson Tarigan, 2003*), PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga, Pendekatan Produksi; Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah. Untuk menghitung pendapatan dengan cara pendekatan produksi, sebagai berikut:

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan

$Q_1, Q_2, Q_3,$ dan Q_n = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke- n

$P_1, P_2, P_3,$ dan P_n = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke- n

7. Jumlah Penduduk

a. Pengertian Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”.

Sedangkan menurut Said (2001), yang dimaksud dengan penduduk adalah” jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun tidak semata-mata tergantung dari jumlah penduduknya saja, tetapi lebih ditekankan pada efisiensi dan produktivitas dari penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun *output* meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian (Jhingan, 2003).

Pada tahun 2008 Jhinghan mengemukakan pengaruh buruk pertumbuhan penduduk yang tinggi terhadap perekonomian yang dalam hal ini pendapatan per kapita. Pertumbuhan penduduk cenderung memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu:

- 1) Memperberat beban penduduk pada lahan
- 2) Menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka
- 3) Memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga, biaya meningkat.

Kondisi ini akan semakin parah apabila perentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah.

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, dan ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi,

dinilai hanya menambah beban pembangunan. jumlah penduduk yang besar akan memperkecil PDRB dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan .

Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 2006).

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mula muncul gagasan baru yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. gagasan tersebut di kemukakan oleh Robert Cassen (dalam Todaro dan Smith, 2006) yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Penduduk bukan merupakan penyebab utama rendahnya taraf hidup masyarakat, kesenjangan pendapatan atau terbatasnya kebebasan dalam membuat pilihan yang merupakan masalah pokok dalam suatu negara
- 2) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil.

- 3) Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampaui cepat, meskipun bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari hal itu merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara.

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ada tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk, yakni berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional.

b. Jumlah Penduduk dan Kemiskinan

Terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk terhadap Tingkat kesejahteraan masyarakat.. Pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun *ouput* meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian (Jhinghan,2003).

Teori siklus populasi kemiskinan (Todaro, 2006) merupakan argumen utama dari para ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan. Menurut teori Malthus (dalam Todaro dan Smith, 2006) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk, maka PDRB (dalam masyarakat agraris, PDRB diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.

Hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan dapat berepengaruh positif dan juga negatif, pengaruh tersebut tergantung pada penjelasan di bawah ini: dihubungkan dengan aspek kualitasnya, pertumbuhan penduduk ini bisa berakibat positif dan bisapula berakibat negatif. Pertumbuhan penduduk yang berakibat positif apabila pertumbuhannya dapat mendorong pembangunan ekonomi, artinya kenaikan jumlah penduduk dapat memungkinkan bertambahnya tenaga kerja yang mampu mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. sedangkan pertumbuhan penduduk dapat berakibat negatif apabila pertumbuhannya dapat menghambat pembangunan

ekonomi. artinya, penambahan penduduk tidak dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menurunkan kebutuhan konsumsi hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang baik adalah jika pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan.

Pertama, adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan.

Kedua, adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan prolosi inovasi teknologi dan institusional (Simon dikutip dalam Thomas,2001)

8. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Secara umum investasi meliputi penambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembukaan tanah baru dan sebagainya. Banyak pakar ekonomi yang mengemukakan mengenai pengertian investasi

tersebut. Sukirno (2008) menyatakan bahwa “investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.” Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu dalam perekonomian.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi antara lain:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang
- 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan inflasi dalam pemilihan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
- 3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara didunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Disisi lain, Harjono (2007) mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical*

person) dalam upaya meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Adapun menurut Halim (2005:4) investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian investasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya investasi diantaranya adalah (Prasetyo 2009:98):

1) Tingkat bunga

Jika tingkat bunga rendah maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi. karena kredit dari bank menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaiknya jika tingkat bunga tinggi. maka tingkat investasi akan rendah, karena tingkat kredit dari bank tidak dapat memberikan keuntungan dalam proyek investasi

2) Tingkat inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena apabila tingkat inflasi yang terlalu tinggi maka akan terjadi penurunan output. Namun inflasi juga dapat berdampak positif terhadap investasi apabila tingkat investasinya rendah. Karena dapat memberikan keuntungan kepada pengusaha

3) Peningkatan aktivitas perekonomian

Jika ada perkiraan peningkatan aktivitas perekonomian di masa yang akan datang, walaupun tingkat suku bunga lebih besar dari MEC, maka investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh para investor yang mempunyai insting tajam (*risk seeking*). Karena investor menganggap bahwa investasi di masa yang akan datang memperoleh banyak keuntungan. Sekalipun faktor insting ini bukan faktor utama, tetapi penting untuk dipertimbangkan oleh para investor dalam mempengaruhi keputusan.

4) Tenaga kerja

Banyaknya tenaga kerja yang tersedia merupakan daya tarik investor untuk berinvestasi. Dikarenakan dengan banyaknya tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi, peningkatan kapasitas produksi tersebut nantinya akan meningkatkan pula investasi

5) Tingkat keuntungan investasi yang akan di peroleh

Semakin tinggi tingkat keuntungan dalam berinvestasi sudah barang tentu akan semakin besar tingkat investasi tersebut. Namun, secara umum semakin tinggi tingkat keuntungan dari investasi juga semakin tinggi risikonya

6) Faktor-faktor lain

Selain kelima faktor tersebut, investasi juga cukup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kemajuan teknologi, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, dan tentunya tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahan.

9. Tenaga Kerja

Sumber daya Manusia (SDM) atau *Human Resources* mengandung dua pengertian yaitu pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia, Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau Man Power (Simanjuntak,2001).

Di Indonesia, yang termasuk golongan tenaga kerja yaitu batas umur minimal 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk Indonesia berumur muda sudah bekerja atau mencari pekerjaan (Simanjutak, 2001).

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja atau *Labor force* dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang

mengurus rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya (Simanjuntak, 2001).

Menurut Badan Pusat Statistik (2003) yang di maksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari atau mengaharap pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja.

Bekerja yaitu mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam seperti (Simanjuntak, 2001):

- a. Pekerjaan tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatan sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
 - b. Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
 - c. Orang-orang yang bekerja dibidang keahlian seperti dokter atau tukang
- Sedangkan orang yang digolongkan sedang mencari pekerjaan adalah

(Simanjuntak, 2001):

- a. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- b. Mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan.

- c. Mereka yang dibebaskan tugas tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yaitu:

- a. Sekolah yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah.
- b. Mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu tanpa mendapatkan upah.
- c. Penerima pendapatan, mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan, misalnya pensiunan, bunga simpanan dan sebagainya.
- d. Lainnya yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lain.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model	Hasil
1.	Restuty Anggereny Rumahorbo (2014), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara.	(Variabel Bebas): Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Inflasi, dan Pengangguran (Variabel Terikat): Jumlah Penduduk Miskin	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,932199 yang berarti bahwa variabel –variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Inflasi dan Pengangguran berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara.

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model	Hasil
2.	Ni Ketut Eni Endrayani (2015), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.	(Variabel Bebas): Inflasi, Tingkat Pendidikan, Investasi (Variabel Terikat): tingkat kemiskinan (Variabel Intervening): Pengangguran	<i>Path Analysis</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh menurunkan kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Investasi Berpengaruh meningkatkan Kemiskikinan melalui Pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening yaitu Pengangguran.
3.	Daniel Priyanto (2017), Analisis pengaruh PMA, PMDN dan laju inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1990 – 2003	(Variabel Bebas): pma, pmdn, inflasi (Variabel Terikat): Kemiskinan.	Regresi linier berganda	kesimpulan bahwa secara tidak langsung variabel PMA, PMDN dan Laju Inflasi berpengaruh secara nyata/signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah.
4.	MHD. HABIBI PULUNGAN (2016), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara.	(Variabel Bebas): Jumlah Penduduk, kepadatan Penduduk, Tenaga Kerja Sektor Jasa PDRB, TPT. (Variabel Terikat): Kemiskinan.	Data Panel	Hasil Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara adalah kepadatan penduduk, Jumlah penduduk, PDRB, tenaga kerja sektor jasa dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Ada dua faktor berbeda pengaruh terhadap Kemiskinan. Yaitu : (1) Kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan meningkatkan Kemiskinan dan (2) variabel PDRB dan tenaga kerja sektor jasa berpengaruh positif dan signifikan mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model	Hasil
5.	Yenni Hidayah Sari Hasibuan (2018), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara.	(Variabel Bebas): Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan asli daerah (Variabel Terikat): kemiskinan.	Data Panel dan metode fixed effect model	Hasil Penelitian menemukan bahwa tidak semua hasilnya sesuai dengan hipotesis. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara.
6.	Elida Madona Siburian (2018), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara	(Variabel Bebas): IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). (Variabel Terikat): Kemiskinan.	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai sebsar 16,99 dan nilai sig sebesar 0,000. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara statistik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
7.	Sufi Khairuni Hasibuan (2018) Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan DI Sumatera Utara Tahun 2000-2016.	(Variabel Bebas): PDRB, Pendidikan, Pengangguran (Variabel Terikat): Kemiskinan.	VAR	Hasil uji VAR menunjukkan adanya pengaruh positif pendidikan terhadap kemiskinan, yang artinya setiap kenaikan angka pendidikan satu persen maka akan berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan pengangguran mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil analisis <i>variance decomposition</i> menunjukkan seberapa besar variabel bebas memberikan kontribusi pada variabel kemiskinan, yaitu variabel PDRB sebesar -0,34%, Pendidikan sebesar 25% dan Penganggura sebesar 3,14 %.
8.	I Komang Agus	(Variabel	Regresi	Hasil menunjukkan bahwa

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model	Hasil
	Adi Putra (2018), Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.	Bebas): Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Tingkat Pendidikan (Variabel Terikat): Tingkat Kemiskinan.	Linier Berganda	Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh dominan terhadap Tingkat Kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2016 dibandingkan kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan, dengan kontribusi sebesar 64,32 %.
9.	Arnah Ritonga (2017), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014.	(Variabel Bebas): Angkatan Kerja, Inflasi, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Variabel Terikat): Pengangguran.	<i>Ordinary Least Square</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh positif sebesar 3,059904% dan tidak signifikan, inflasi berpengaruh positif sebesar 0,020060% dan tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif sebesar 3,105293% dan signifikan, upah minimum berpengaruh negatif sebesar 1,003877% dan signifikan, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif sebesar 0,282733% dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi sumatera utara tahun 1978-2014. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tahun 1978 - 2014 dalam penelitian ini adalah faktor pertumbuhan ekonomi.

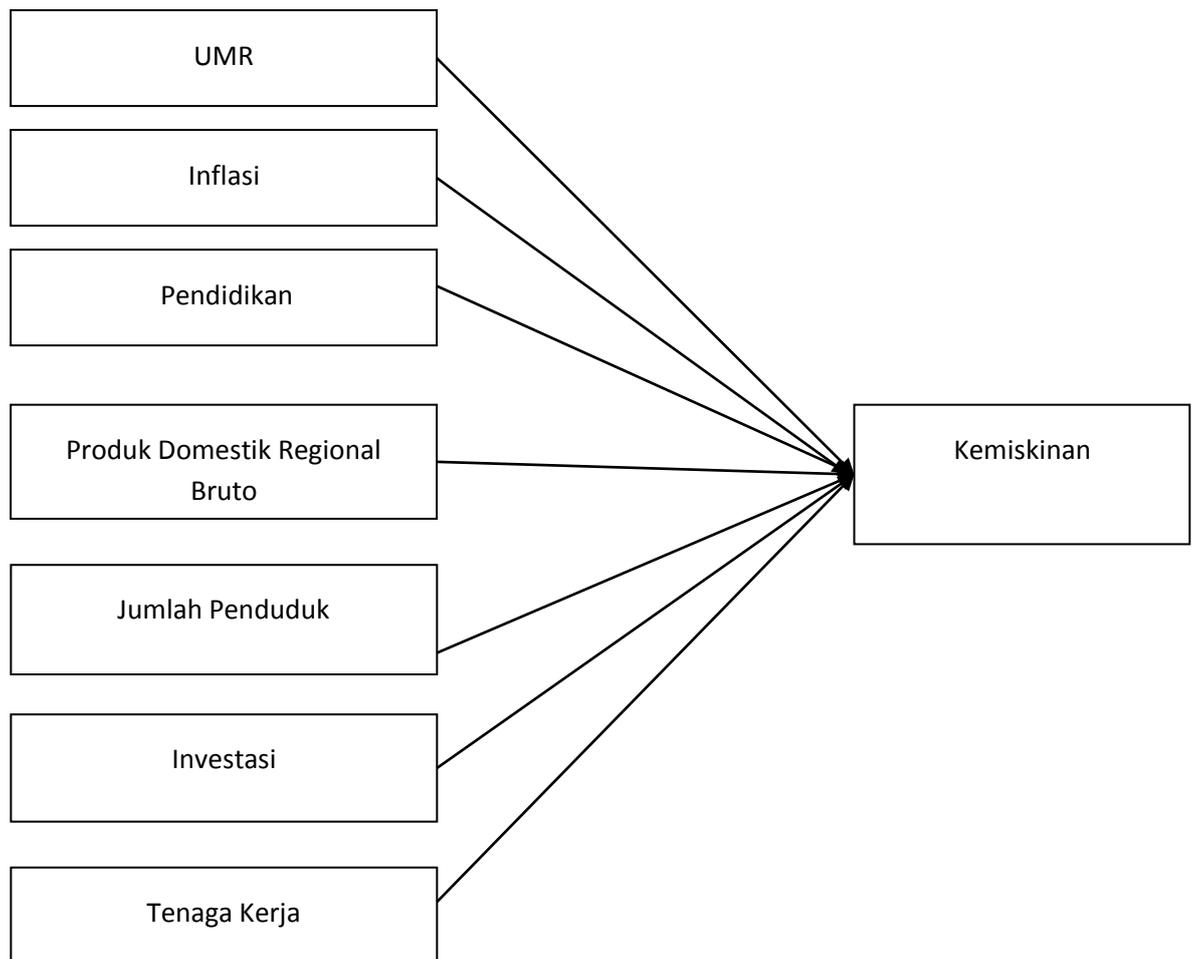
No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model	Hasil
10.	Siti Astri Wiryani (2018). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara.	(Variabel Bebas): Angka Harapan Hidup, Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Variabel Terikat): Jumlah Penduduk Miskin.	Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan Angka Harapan Hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara, dan Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka Tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2019

C. Kerangka Konseptual

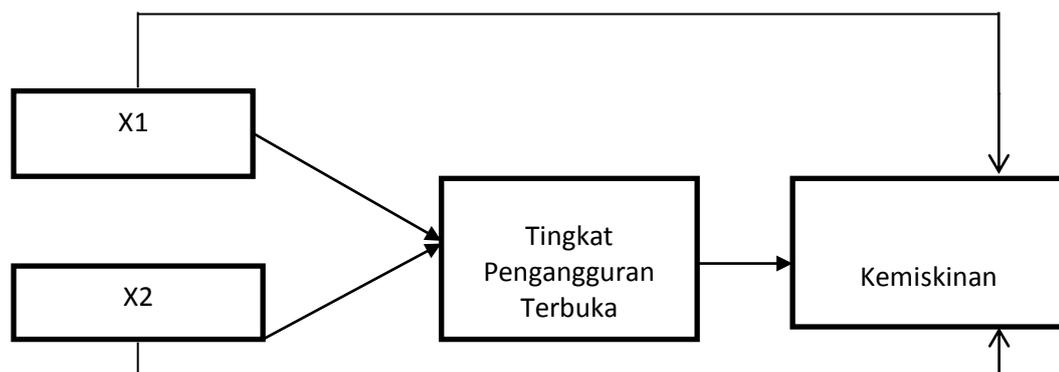
Dalam penelitian ada namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini hubungan UMR, inflasi, pendidikan, PDRB, jumlah penduduk, investasi, tenaga kerja.

Adapun kerangka konseptual dari proposal ini adalah :



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual *Confirmatory Factor Analysis*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka konseptual Confirmatory Factor Analysis sebagai metode pertama. Dari 7 (tujuh) variabel maka akan dilihat variabel yang paling berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.



Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual Path Analysis

Dari hasil regresi dengan metode *CFA* akan dapat 2 (dua) variabel atau lebih yang paling berpengaruh terhadap Kemiskinan. Kemudian akan di olah lagi dengan menggunakan metode *path analysis*.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara di dalam suatu penelitian dan harus diuji kebenarannya. Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak, dan dapat diterima apabila hipotesis tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian yang nyata dan empiris. Menurut Sugiyono (2013), mengemukakan bahwa hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian.

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Semua faktor-faktor (UMR , inflasi, Pendidikan, PDRB, jumlah penduduk, investasi, tenaga kerja) relevan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Faktor-faktor yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel intervening.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Sesuai dengan pendapat (Rusiadi 2013:14 dalam Indri 2017:58) penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan suatu gejala.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor manakah (UMR, inflasi, Pendidikan, PDRB, jumlah penduduk, investasi, tenaga kerja) yang relevan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. dan menganalisis apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. Untuk mendukung analisis kuantitatif digunakan model *CFA*, *Path* dimana kedua model ini mampu menjelaskan hubungan keterkaitan antar variabel.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan mulai April 2019 s/d Juli 2019 dan rincian waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Apr-19	Mei-19	Jun-19	Jul-19	Agust-19	Sep-19	Okt-19	Nop-19
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pra penelitian								
2	Penyusunan Proposal								
3	Bimbingan proposal								
4	Seminar proposal								
5	Perbaikan proposal								
6	Penelitian Skripsi								
7	Bimbingan skripsi								
8	Sidang meja hijau								

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:38). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah UMR, Inflasi, Pendidikan, PDRB, Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UMR (Upah Minimum Regional) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Data UMR didapat dari BPS Provinsi Sumatera Utara periode 2001-2017.

2. Tenaga kerja merupakan penduduk berumur 15 tahun atau lebih antara lain yang bersedia dan sanggup bekerja. termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja yang dinyatakan dalam satuan jiwa. Data tenaga kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara periode 2001-2017.
3. Inflasi dalam penelitian ini merupakan data tingkat inflasi tahunan Provinsi Sumatera Utara periode 2001-2017, yang dinyatakan dalam satuan persen. Data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
4. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelajaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Data investasi tersebut di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2001-2017.
5. Pendidikan dalam penelitian ini merupakan indeks yang menyatakan tingkat pendidikan masyarakat Sumatera Utara dari tahun 2001-2017 yang diukur dengan menggunakan variabel rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara. Adapun satuan ukur pendidikan adalah dalam satuan persen per/tahun.
6. Pengangguran Terbuka dalam penelitian ini merupakan tingkat angkatan kerja di Sumatera Utara dari tahun 2001-2017 yang sama sekali tidak

mempunyai pekerjaan. Adapun satuan ukur dengan tingkat pengangguran terbuka adalah dalam satuan persen pertahun.

7. Jumlah Penduduk menurut (BPS) Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Data jumlah penduduk 2001-2017 di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.
8. Kemiskinan menurut (BPS) Badan Pusat Statistik suatu ketidakmungkinan untuk memenuhi kebutuhan makanan, kesehatan, pakaian, pendidikan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya dan satuan yang digunakan adalah satuan persen. Data Kemiskinan di peroleh dari BPS Sumatera Utara periode 2001- 2017.
9. PDRB merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah Data PDRB di peroleh dari BPS Sumatera Utara periode 2001-2017.

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Simbol	Sumber	Tahun	Skala	Satuan
1	Kemiskinan	KMS	BPS	2001-2017	Rasio	Persen
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	BPS	2001-2017	Rasio	Persen
3	Upah Minimum Regional	UMR	BPS	2001-2017	Rasio	Rupiah
4	Inflasi	INF	BPS	2001-2017	Rasio	Persen
5	Pendidikan	PDK	BPS	2001-2017	Rasio	Persen
6	Produk domestik regional bruto	PDRB	BPS	2001-2017	Rasio	Rupiah
7	Jumlah Penduduk	JP	BPS	2001-2017	Rasio	Jiwa
8	Investasi	INV	BPS	2001-2017	Rasio	Rupiah
9	Tenaga Kerja	TK	BPS	2001-2017	Rasio	Jiwa

D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data tersebut diperoleh dari laporan tahunan situs resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Library Reaserch* (Riset Kepustakaan), yaitu pengambilan data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet dan hal lain yang berhubungan dengan aspek penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid.

F. Teknik Analisis Data

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis data sebagai berikut :

1. Model CFA (*Confirmatory Factor Analysis*)

Confirmatory Factor Analysis memiliki tujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau *variate* (faktor) dengan rumus sebagai berikut :

$$X_i = B_{i1} F_1 + B_{i2} F_2 + B_{i3} F_3 + \dots + V_i \mu_i$$

Dimana :

X_i = Variabel ke-I yang dibakukan

B_{ij} = Koefisien regresi parsial yang untuk variabel i pada common faktor ke –j

F_j = Common faktor ke-i

V_i = Koefisien regresi yang dibakukan untuk variabel ke-i pada faktor unik ke –i

μ_i = Faktor unik variabel ke-i

Kriteria pengujian Confirmatory Factor Analysis adalah jika faktor dinyatakan sebagai faktor dominan apabila memiliki koefisien komponen matrix $\geq 0,5$. Khusus untuk analisis faktor, sejumlah asumsi berikut harus dipenuhi :

- a. Koefisien Antar Variabel Independen.
 Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya dengan nilai korelasi diatas 0,5.
- b. Korelasi Parsial atau *Partial Correlation* digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dapat dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol.
- c. Pengujian seluruh matriks korelasi atau korelasi antar variabel yang diukur dengan besaran *Barlett Test of Spechericity* atau *Measure Sampling Adequancy* (MSA). Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan diantara paling sedikit beberapa variabel.
- d. Pada beberapa kasus, asumsi Normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi.

2. Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Path analysis atau analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel (Sani dan maharani, 2013:74). Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel (endogen). Koefisien jalur adalah koefisien regresi yang distandarkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah riset dalam angka baku (Z-score). Analisis ini dibantu oleh bantuan

software SPSS 16, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ sebagai taraf signifikansi F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikansi Alpha = 0,05 atau $P \leq 0,05$ yang dimunculkan kode (sig.T) dimana hal tersebut digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Path Analysis (analisis jalur). Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, dengan persamaan sebagai berikut :

- a. Persamaan Pertama

$$Y1 = \beta_{Y1X1} X1 + \beta_{Y1X2} X2 + \epsilon_1$$

- b. Persamaan Kedua

$$Y2 = \beta_{Y2X1} X1 + \beta_{Y2X2} X2 + \beta_{Y2Y1} Y1 + \epsilon_2$$

Persamaan Aplikasi

1. Persamaan 1 $Y2 = \beta_{Y2X1} X1 + \beta_{Y2Y1} Y1 + e$
2. Persamaan 2 $Y2 = \beta_{Y2X2} X2 + \beta_{Y2Y1} Y1 + e$
3. Persamaan 3 $Y1 = \beta_{Y1X1} X1 + e$
4. Persamaan 4 $Y1 = \beta_{Y1X2} X2 + e$

Keterangan :

Y1 = Tingkat Pengangguran Terbuka

Y2 = Kemiskinan

X1 = Variabel terpilih pertama

X2 = Variabel terpilih kedua

ϵ = *Error Term* / Tingkat Kesalahan

Analisis Jalur (Path Analysis) didukung oleh uji mediasi. Uji Mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat :

- a. $P1 < P2 \times P3$ atau pengaruh langsung $<$ pengaruh tidak langsung maka H_a diterima.
- b. $P1 > P2 \times P3$, atau pengaruh langsung $>$ pengaruh tidak langsung maka H_a ditolak.

3. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu : Uji Normalitas Data, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi data. Dalam penelitian ini analisis uji normalitas yang digunakan adalah analisis statistik yaitu menggunakan hasil hitung *Jaque-Bera Normality Test (JB-Test)*, dengan ketentuan apabila nilai $JB-Test < 9,2$ dapat diartikan data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang linier di antara beberapa variabel bebas atau semua variabel bebas. Jika terjadi multikolinieritas yang serius di dalam model regresi maka estimasi koefisien regresi masing-masing variabel bebas akan menyimpang (bias). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala

multikolinieritas dalam model regresi dengan melihat nilai koefisien (r) antara sesama variabel bebas, dalam hal ini digunakan koefisien korelasi pearson. Apabila nilai koefisien korelasi (r) antara sesama variabel bebas lebih besar dari nilai koefisien determinasi (r^2), maka dengan tegas dapat disimpulkan bahwa multikolinieritas yang terdapat dalam model regresi dinyatakan sebagai masalah serius.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus otokorelasi banyak terjadi pada data time series. Autokorelasi dapat dideteksi melalui uji Durbin-Watson yang merupakan cara yang paling populer, bahkan beberapa program siap pakai termasuk SPSS pun menyediakan fasilitas untuk melakukan uji tersebut. Santosa dan Ashari (2005:240) menyatakan, uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW tabel (d_L & d_u).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kemiskinan Di Sumatera Utara

Daerah provinsi Sumatera Utara terletak diantara 1-4 o Lintang Utara (LU) dan 98-100 o Bujur Timur (BT), merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di Kawasan Palung Pasifik Barat. Daerah ini berbatasan dengan NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah Selatan, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat. Provinsi dengan luas 71 680 km persegi secara geografis terbagi atas Wilayah Pantai Timur, Wilayah Dataran Tinggi, Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Kepulauan. Wilayah Pantai Timur merupakan dataran rendah seluas 26 320 km persegi (36.8% dari luas Sumatera Utara) adalah daerah subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan tinggi pula. Wilayah Dataran Tinggi dan Wilayah Pantai Barat seluas 45 320 km persegi (63.2%) sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur tanah. Beberapa danau, air terjun, dan gunung berapi ada disini. Sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik (BPS Sumatera Utara 2004 Terdapat 1,80 juta penduduk miskin di Sumatera Utara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumatera Utara. Mukhamad Mukhanif mengatakan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 8,94% dari jumlah total penduduk. Adapun, jumlah penduduk miskin di kota dan di desa nyaris sama dengan 686.970 jiwa penduduk miskin di kota dan 605.020 jiwa di

desa. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) periode September 2017, 1,45 juta penduduk di Sumatera Utara masuk kategori miskin karena hanya mengeluarkan biaya rata-rata perbulan sebesar Rp451.673 perkapita. Penduduk di desa masuk kategori miskin bila hanya mampu memiliki pengeluaran rata-rata Rp435.492 perkapita setiap bulan. Sementara itu, penduduk di kota masuk kategori miskin karena tak mampu berbelanja lebih dari Rp465.790 perkapita perbulan. Adapun, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada periode September 2018 lebih rendah 33.000 penduduk bila dibandingkan dengan periode Maret 2018. Jumlah penduduk miskin di periode September lebih rendah dibandingkan pada periode Maret meskipun dari sisi garis kemiskinan naik 3,6% dari Rp435.970 perkapita perbulan. "Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara terus turun tetapi belum signifikan," ujarnya. Lebih lanjut, faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pada garis kemiskinan yakni sebesar 76%. Sisanya, komoditas bukan makanan. Artinya, dia menyebut, penduduk miskin hanya mampu membeli bahan makanan. Dari sisi bahan makanan, beras menyumbang kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan yakni 20,73% di perkotaan dan 30,39% di perdesaan. Komoditas pangan lain yang juga memengaruhi yakni rokok kretek filter 12,54% bagi penduduk di perkotaan dan 9,97% bagi penduduk di perdesaan. Kemudian, telur ayam ras sebesar berkontribusi terhadap garis kemiskinan di kota dan 3,17% di desa. Untuk komoditas nonpangan, kontributor terbesar berasal dari biaya perumahan yakni 5,68% di perkotaan dan 4,55% di perdesaan. Selain itu, bensin menyumbang sebesar 4,69% terhadap garis kemiskinan di kota dan 2,77% di desa. Terakhir,

listrik berkontribusi sebesar 3,61% terhadap garis kemiskinan di kota dan biaya pendidikan menyumbang 1,66% terhadap garis kemiskinan di desa.

2. Perkembangan Variabel Penelitian

a. Kemiskinan

Menurut Elvira (2018), menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin.

Daftar tabel : 4.1 Data tingkat kemiskinan 2001-2017

No	Tahun	Jumah penduduk miskin Sumatera Utara (Jiwa)	Presentase tingkat kemiskinan Sumatera Utara (%)
1	2001	2.017.000	17.21
2	2002	1.883.900	15.84
3	2003	1.889.400	15.89
4	2004	1.800.100	14.93
5	2005	1.840.200	14.68
6	2006	1.979.700	15.66
7	2007	1.768.500	13.90
8	2008	1.611.510	12.47
9	2009	1.474.230	11.27
10	2010	1.477.100	11.36
11	2011	1.421.44 0	10.83
12	2012	1.400.450	10.41
13	2013	1.416.370	10.39
14	2014	1.360.600	9.85
15	2015	1.463.660	10.53
16	2016	1.455.950	10.35
17	2017	1.453.870	10.22

kemiskinan pada tahun 2001 mencapai 17.21% dengan jumlah mencapai 2.017.000 jiwa hingga pada tahun 2010 tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 11.36% dengan jumlah 1.477.100 jiwa dan pada tahun 2017 tingkat kemiskinan sudah mencapai 10.22 dengan jumlah 1.453.870

jiwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2001 hingga 2017.

b. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2010: 472).

Daftar tabel : 4.2 Data tingkat pengangguran terbuka tahun 2001-2017

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera utara (%)
1	2001	9.09
2	2002	10.30
3	2003	11.02
4	2004	11.08
5	2005	22.08
6	2006	26.33
7	2007	20.73
8	2008	18.65
9	2009	16.70
10	2010	15.44
11	2011	15.65
12	2012	12.71
13	2013	12.54
14	2014	12.16
15	2015	13.10
16	2016	12.33
17	2017	12.10

sumber: BPS Sumatera Utara

pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di mulai dari tahun 2001 sebesar 9,09 % sampai Pada tahun 2017 sebesar 12,10%. Persentase tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dalam tabel tersebut pada tahun 2006, dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai 26,33%. Sementara tingkat pengangguran terbuka di tahun 2001 merupakan tahun dengan tingkat pengangguran terbuka terendah dalam tabel tersebut , yaitu sebesar 9,09%.

c. Upah Minimum Regional

Upah minimum adalah upah terendah yang harus diterima setiap kali seseorang bekerja pada orang lain. Pasal 92 No. 12 tahun 2005 memberi amanat kepada perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Daftar tabel : 4.3 Data upah minimum regional tahun 2001-2017

No	Tahun	Upah Minimum Regional
1	2001	340.500
2	2002	464.000
3	2003	505.000
4	2004	537.000
5	2005	600.000
6	2006	737.794
7	2007	761.000
8	2008	822.205
9	2009	905.000
10	2010	965.000
11	2011	1.035.500
12	2012	1.200.000
13	2013	1.375.000
14	2014	1.508.850
15	2015	1.625.000
16	2016	1.811.875
17	2017	1.961.355

upah minimum regional pada tahun 2001 mencapai Rp 340.500 upah minimum regional mengalami peningkatannya setiap tahun hingga pada tahun 2010 sudah mencapai Rp 965.000 dan upah minimum regional pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sudah mencapai Rp 1.961.355.

d. Inflasi

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. (Riri, 2016) Secara umum ada tiga jenis indeks harga yaitu : Indeks Harga Konsumen (INK)

adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, perawatan, kesehatan dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari Indeks Harga Produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku, produk antara peralatan modal, dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan, serta GNP Deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dengan GNP riil dikaitkan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar, sedangkan GNP nominal adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga berlaku

Daftar tabel : 4.4 Data tingkat inflasi tahun 2001-2017

No	Tahun	Inflasi (%)
1	2001	6,79
2	2002	9,59
3	2003	4,23
4	2004	6,80
5	2005	22,41
6	2006	6,11
7	2007	6,6
8	2008	9,72
9	2009	2,61
10	2010	8,00
11	2011	3,67
12	2012	3,86
13	2013	6,18
14	2014	8,17
15	2015	3,24
16	2016	6,34
17	2017	3,20

tingkat inflasi pada tahun 2001 mencapai 6,79% dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2005 yaitu mencapai 22,41% hingga pada

tahun 2017 inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 3,20%

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia, melalui pendidikan seseorang mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur hidupnya secara wajar pendidikan dapat mengubah pola seseorang, dimana melalui pendidikan seseorang banyak memperoleh pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Melalui pendidikan seseorang dapat bersosialisasi secara baik dalam lingkungannya (Fitriana, 2008).

Daftar tabel : 4.5 Data tingkat pendidikan tahun 2001-2017

No	Tahun	Tingkat Pendidikan (%)
1	2001	66.6
2	2002	68.6
3	2003	69.8
4	2004	71.4
5	2005	72
6	2006	72.5
7	2007	72.78
8	2008	73.29
9	2009	73.8
10	2010	74.19
11	2011	74.65
12	2012	75.13
13	2013	75.55
14	2014	68.87
15	2015	66.6
16	2016	68.6
17	2017	69.8

sumber data: BPS

tingkat pendidikan pada tahun 2001 mencapai 66,6% dan pada tahun 2013 tingkat pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai

75,13 dan pada tahun 2017 tingkat pendidikan mengalami penurunan mencapai 69,8%

f. Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (*Robinson Tarigan, 2003*), PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Daftar tabel : 4.6 Data PDRB tahun 2001-2017

No	Tahun	PDRB
1	2001	240.908.359.000.000
2	2002	293.189.141.000.000
3	2003	309.805.609.000.000
4	2004	337.328.949.000.000
5	2005	325.897.791.000.000
6	2006	334.347.404.000.000
7	2007	351.792.273.000.000
8	2008	362.172.368.000.000
9	2009	384.559.225.000.000
10	2010	377.718.902.000.000
11	2011	396.587.623.000.000
12	2012	421.463.954.000.000
13	2013	411.537.123.000.000
14	2014	436.573.310.000.000
15	2015	454.955.850.000.000
16	2016	463.775.460.000.000
17	2017	487.531.231.000.000

sumber data: BPS

PDRB pada tahun 2001 mencapai sekitar Rp240 triliun dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 mencapai Rp396 triliun hingga pada tahun 2017 PDRB sudah mencapai Rp487 triliun BDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya.

g. Jumlah Penduduk

menurut Said (2001), yang dimaksud dengan penduduk adalah” jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun tidak semata-mata tergantung dari jumlah penduduknya saja, tetapi lebih ditekankan pada efisiensi dan produktivitas dari penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang

Daftar tabel : 4.7 Data tingkat penduduk tahun 2001-2017

No	Tahun	Penduduk Sumatera Utara (Jiwa)
1	2001	11.513.970
2	2002	11.643.780
3	2003	11.923.460
4	2004	12.123.360
5	2005	12.322.091
6	2006	12.455.690
7	2007	12.589.660
8	2008	12.723.960
9	2009	12.858.570
10	2010	12.982.204
11	2011	13.220.321
12	2012	13.408.202
13	2013	13.590.250
14	2014	13.766.851
15	2015	13.937.797
16	2016	14.102.911
17	2017	14.262.147

sumber data:BPS

tingkat penduduk sumatera utara pada tahun 2001 mencapai 11.513.970 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 mencapai 12.723.960 jiwa tingkat penduduk di sumatera utara mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 sudah mencapai 14.262.147 jiwa.

h. Investasi

Sukirno (2008) menyatakan bahwa “investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Daftar tabel : 4.8 Data investasi sumatera utara tahun 2001-2017

No	Tahun	Investasi (Milyar)
1	2001	7991,9
2	2002	839,13
3	2003	1.116,7
4	2004	1.981,4
5	2005	1.139,2
6	2006	1.082,6
7	2007	4.631,9
8	2008	3.176,8
9	2009	2.914,6
10	2010	2.290,9
11	2011	8.507,5
12	2012	8,790,3
13	2013	15.886,6
14	2014	11.075,8
15	2015	21.486,3
16	2016	18.497,7
17	2017	19.562.1

sumber data: BPS

investasi pada tahun 2001 mencapai Rp7991,9 milyar dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 mencapai Rp8.507,5 milyar hingga pada tahun 2017 tingkat investasi mencapai Rp19.562.1 milyar investasi sumatera utara mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

i. Tenaga Kerja

Sumber daya Manusia (SDM) atau *Human Resources* mengandung dua pengertian yaitu pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia, Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau Man Power (Simanjuntak,2001).

Daftar tabel : 4.9 Data tenaga kerja tahun 2001-2017

No	Tahun	Tenaga Kerja
1	2001	9.023.803
2	2002	9.119.076
3	2003	7.890.583
4	2004	7.997.002
5	2005	8.067.008
6	2006	8.208.651
7	2007	9.378.148
8	2008	8.919.973
9	2009	9.106.738
10	2010	9.520.274
11	2011	8.759.321
12	2012	10.834.317
13	2013	8.931.423
14	2014	9.351.041
15	2015	9.498.974
16	2016	9.641.892
17	2017	9.789.363

sumber data: BPS

Tingkat tenaga kerja pada tahun 2001 mencapai 9.023.803 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 mencapai 10.834.317 jiwa dan tingkat tenaga kerja cenderung menurun pada tahun 2017 mencapai 9.789.363 jiwa.

3. Hasil Uji CFA (*CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS*)

Untuk menganalisis data hasil penelitian maka peneliti melakukan dan menerapkan metode analisis kuantitatif yaitu dengan mengolah data kemudian diinterpretasikan sehingga akan diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis faktor yang bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau variabel (faktor). Pengolahan data menggunakan program SPSS, dengan hasil sebagai berikut :

Daftar tabel : 4.10 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.633
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	106.801
	Df
	28
	Sig.
	.000

Metode yang digunakan dalam analisis faktor ini yaitu metode Komponen Utama. Dari tabel KMO and Bartlett's Test, di dapat nilai Kaiser Mayer Olkin (KMO) sebesar 0,633 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,5. Nilai ini menandakan data sudah valid untuk dianalisis lebih lanjut dengan Analisis faktor. Nilai uji Bartlett sebesar 106.801 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 di bawah 5%, maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas, atau dengan kata lain model faktor yang digunakan sudah baik.

Daftar tabel : 4.11 Communalities

	Initial	Extraction
Inf	1.000	.227
Tk	1.000	.534
Jp	1.000	.321
Pdrb	1.000	.905
Umr	1.000	.902
Inv	1.000	.752
Pdk	1.000	.967

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Selanjutnya untuk melihat variabel mana yang memiliki nilai communalities correlation di atas 0,5 atau di atas 50% dapat dilihat pada tabel communalities berikut ini. Hasil analisis data menunjukkan semakin besar communalities sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel communalities menunjukkan hasil extraction secara individu terdapat lima variabel Tenaga Kerja, PDRB, UMR, Investasi, dan pendidikan yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau 50% yaitu kelayakan selanjutnya harus diuji dengan *variance Explained*.

Tabel 4.12: Total variance Explained

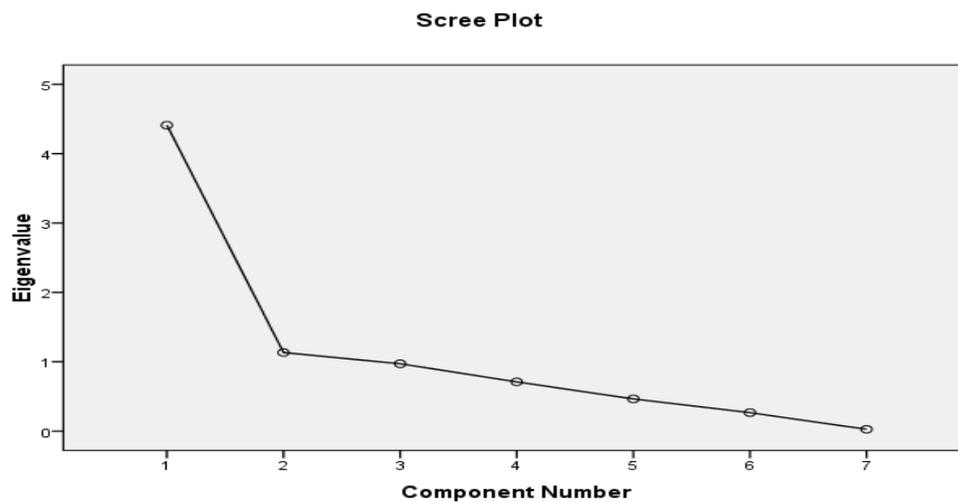
Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.409	55.111	55.111	4.409	55.111	55.111	4.394	54.919	54.919
2	1.133	14.162	69.273	1.133	14.162	69.273	1.148	14.354	69.273
3	.972	12.147	81.420						
4	.710	8.880	90.300						
5	.465	5.808	96.109						
6	.267	3.340	99.449						
7	.028	.345	99.794						

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Berdasarkan hasil total variance explained pada tabel initial Eigenvalues, diketahui bahwa hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi factor mempengaruhi kemiskinan. Eigenvalues menunjukkan kepentingan relative masing-masing factor dalam menghitung varianske 7 variabel yang dianalisis. Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya ada dua faktor yang terbentuk. Karena kedua factor memiliki nilai total angka eigenvalues diatas 1 yakni, sebesar 4,409 untuk factor satu, 1.133 untuk factor dua. Hal ini menunjukkan bahwa dua factor adalah paling bagus untuk meringkas tujuh variabel tersebut, sehingga proses factoring berhenti pada 2 faktor saja yang akan ikut dalama analisis selanjutnya.

Gambar 4.1 scree plot



Grafik scree plot menunjukkan bahwa dari satu ke dua faktor (garis dari sumbu Component Number = 1 ke 2), arah grafik menurun. Kemudian dari angka 2 ke 3, garis masih menurun. Sedangkan dari angka 3 ke angka 4 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y (Eigenvalues). Hal ini menunjukkan bahwa 2 faktor adalah paling bagus untuk meringkas ketujuh variabel tersebut

Daftar tabel : 4.13 Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Pdrb	.949	.075
Umr	.944	-.106
Inv	.833	-.241
Tk	.730	.031
Jp	.556	-.109
Inf	-.470	.076
Pdk	.050	.982

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Setelah diketahui bahwa dua factor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel Component Matrix menunjukkan distribusi dari tujuh variabel tersebut pada dua faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah factor loadings, yang menunjukkan besar korelasi antar suatu variable dengan faktor 1, faktor 2, . Proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris. Pada tabel component matrix menunjukkan korelasi diatas 0,5. Pada faktor 1 adalah , PDRB, UMR, Jumlah Penduduk, Investasi, Tenaga Kerja. Pada faktor 2 yaitu variabel pendidikan. Selanjutnya melakukan proses factor rotation terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk kedalam factor tertentu.

Daftar tabel : 4.14 Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Umr	.949	-.041
Pdrb	.941	.139
Kms	-.905	-.337
Inv	.848	-.183
Tk	.726	.080
Jp	.562	-.071
Inf	-.474	.044
Pdk	-.017	.983

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Matrix hasil proses rotasi (Rotated Component Matrix) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa faktor loading yang dulu nya kecil semakin kecil dan faktor loading yang besar semakin di perbesar terdapat 2 variabel terpilih pada komponen satu yaitu UMR dan pada komponen dua yaitu pendidikan

Daftar tabel : 4.15 Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.998	.068
2	-.068	.998

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.

Dari tabel Component Transformation Matrix, terlihat angka-angka yang ada pada diagonal, *component 1* dengan 1, *component 2* dengan 2 terlihat kedua angka di atas 0,5. Hal ini membuktikan kedua factor (component) yang terbentuk sudah tepat, karena mempunyai korelasi yang tinggi.

Berdasarkan hasil nilai component matrix diketahui bahwa dari tujuh faktor, maka yang layak untuk mempengaruhi kemiskinan adalah dua faktor yang berasal dari:

- Komponen 1 terbesar : UMR
- Komponen 2 terbesar : Pendidikan

Setelah dilakukan Uji CFA dan diperoleh hasil bahwa ada 2 variabel yang relevan dalam mempengaruhi kemiskinan yaitu, pendidikan dan UMR. Sehingga model persamaan Analisis Jalur (Path Analysis) dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

Hasil Persamaan 1 ($Y_2 = \beta_{21}X_1 + \beta_{22}Y_1 + e$)

Hasil Persamaan 2 ($Y_1 = \beta_{11}X_1 + \beta_{12}X_2 + e$)

Hasil Persamaan 3 ($Y_1 = \beta_{11}X_1 + e$)

Hasil Persamaan 4 ($Y_1 = \beta_{11}X_2 + e$)

Dimana :

Y_1 = Tingkat pengangguran terbuka

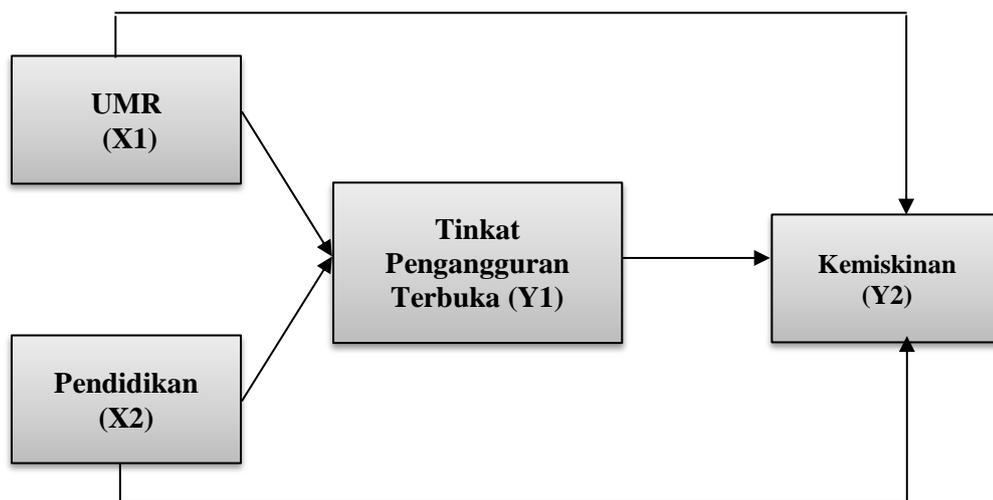
Y_2 = kemiskinan

X_1 = UMR

X_2 = pendidikan

e = Error Term

Gambar 4.2: Kerangka Konseptual *PATH ANALISIS*



Analisis Jalur (Path Analysis) didukung oleh uji mediasi. Uji Mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat :

$P_1 < P_2 \times P_3$ atau pengaruh langsung < pengaruh tidak langsung maka H_a diterima

P1 > P2 x P3, atau pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung maka H_0 ditolak

Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu :

- a. Uji Normalitas Data
- b. Uji Multikolinieritas
- c. Uji Autokorelasi

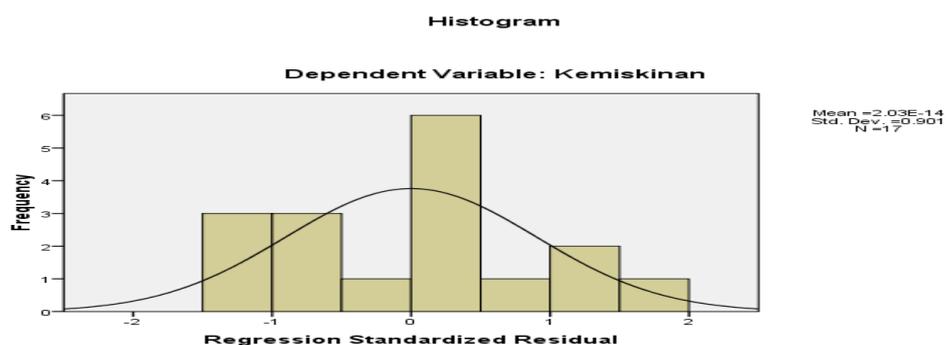
4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Data yang diperoleh dari data sekunder secara time series, selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik sebagai berikut :

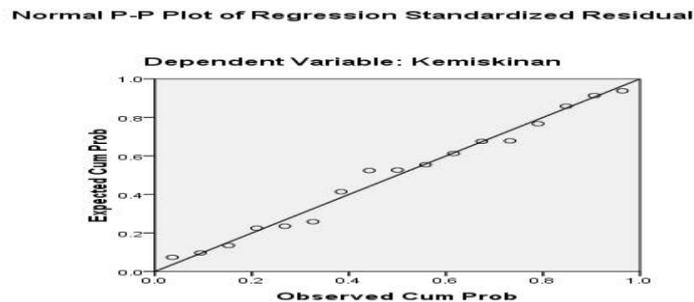
a. Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dideteksi melalui analisa grafik histogram dan normal P-P Plot yang dihasilkan SPSS sebagai berikut:

Gambar 4.3: histogram



Gambar 4.4 Normal p.p plot



Grafik histogram menunjukkan kecembungan seimbang ditengah dan grafik PP-Plot menunjukkan titik-titik sebaran data berada disekitar garis diagonal maka data dinyatakan berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Data yang baik jika terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji Multikolinieritas sebagai berikut :

Daftar tabel : 4.16 Coefficients(a)

		Correlations		Collinearity Statistics	
Model		Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)				
	TPT	.368	.129	.784	1.275
	UMR	-.935	-.860	.968	1.034
	PDK	-.750	-.370	.806	1.241

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai *tolerance* dan VIF pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* yang

besarnya jauh melebihi angka 0,5 dan VIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 5.

c. Uji Autokorelasi

Daftar tabel : 4.17 Model Summary

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0,893905	36,5103862	3	13	0,000	1,404196

Nilai DW=1,404 Berada diantara 1-3

Maka data dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi

5. Hasil Analisis Path Analysis

Path Analysis atau analisis jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya.

Hasil Persamaan 1 ($Y_2 = \beta_1 X_1 + \beta_2 Y_1 + e$)

Daftar tabel : 4.18 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.489	1.405		12.446	.000
	Penggangguran	-.019	.072	-.036	-.271	.790
	Umr	-.004	.001	-.876	-6.545	.000

a. Dependent Variable: kemiskinan

Pada persamaan satu di atas tabel *coefficients* menunjukan pengaruh x_1 dan pengaruh y_1 terhadap y_2 dilihat pada model x_1 kolom beta menunjukan besar

hubungan antara x1 terhadap y1 sebesar -0.876 dan pada model y1 kolom beta menunjukkan besarnya hubungan antara y1 dengan y2 sebesar -0.036.

Hasil Persamaan 2 ($Y_2 = \beta_1 X_2 + \beta_2 Y_1 + e$)

Daftar tabel : 4.19 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.011	16.131		2.232	.042
	Pendidikan	-.360	.237	-.416	-1.518	.151
	Penggangguran	.163	.147	.305	1.112	.285

a. Dependent Variable: kemiskinan

Pada persamaan dua di atas tabel *coefficients* menunjukan pengaruh x2 dan pengaruh y1 terhadap y2 dilihat pada model x2 kolom beta menunjukan besar hubungan antara x2 terhadap y1 sebesar -0.416 dan pada model y1 kolom beta menunjukan besarnya hubungan antara y1 dengan y2 sebesar 0.305.

Hasil Persamaan 3 ($Y_1 = \beta_1 X_1 + e$)

Daftar tabel : 4.20 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.551	2.698		6.135	.000
	umr	-.002	.002	-.180	-.709	.489

a. Dependent Variable: penggangguran

Pada persamaan empat di atas tabel *coefficients* menunjukan pengaruh x1 terhadap y1 dilihat pada model x1 kolom beta menunjukan besar hubungan antara x1 terhadap y1 sebesar -0.180.

Hasil Persamaan 4($Y_1 = \beta Y_1 X_2 + e$)

Daftar tabel : 4.21 Coefficients^a

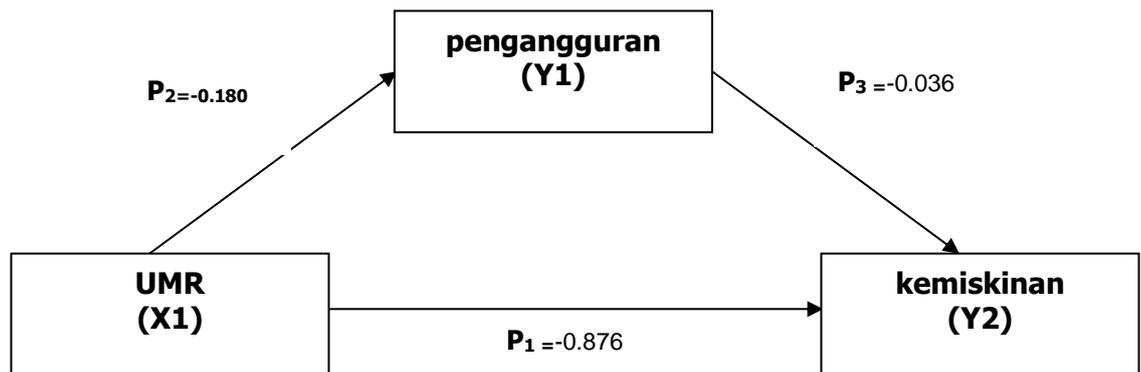
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-36.052	26.786		-1.346	.198
	pendidikan	.712	.375	.441	1.901	.077

a. Dependent Variable: pengangguran

Pada persamaan lima di atas tabel *coefficients* menunjukan pengaruh x_2 terhadap y_1 dilihat pada model x_2 kolom beta menunjukan besar hubungan antara x_2 terhadap y_1 sebesar 0.441.

Interpretasi hasil path analysis :

a. Pengaruh UMR Terhadap Kemiskinan Melalui TPT Sebagai Variabel Intervening.



Gambar 4.5 : Path Analisis Pengaruh Antara UMR Terhadap kemiskinan melalui TPT.

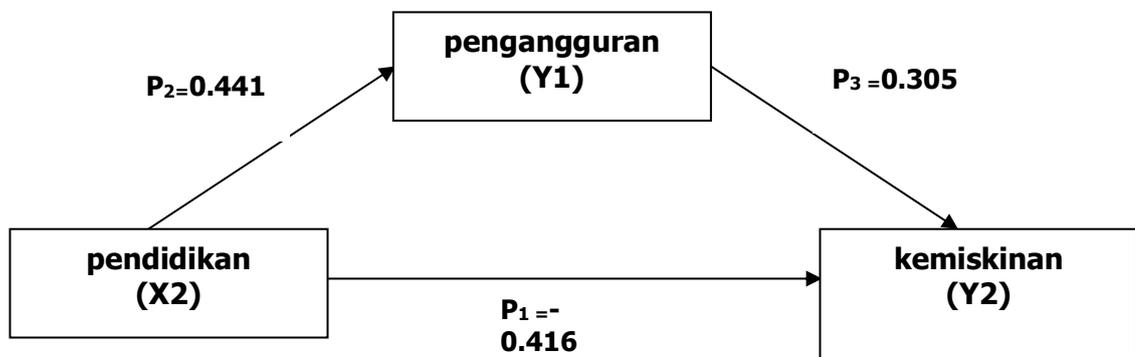
Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa UMR dapat berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh UMR ke TPT (sebagai variabel intervening) lalu ke kemiskinan.

- Besarnya pengaruh langsung UMR terhadap kemiskinan (P_1) = -0.876
- Besar pengaruh tidak langsung UMR terhadap kemiskinan melalui TPT yaitu ($P_2 \times P_3$) (-0.180×-0.036) = 0.00648
- Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi UMR terhadap Kemiskinan melalui pendidikan (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $-0.876 + 0.00648 = -0.89952$
- Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih kecil pengaruh tidak langsung.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

UMR berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan melalui TPT sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa TPT menjadi variabel yang memediasi/intervening antara UMR terhadap Kemiskinan. maka TPT berfungsi sebagai variabel intervening

b. Pengaruh jumlah pendidikan Terhadap Kemiskinan Melalui TPT Sebagai Variabel Intervening.



Gambar 4.6: Path Analisis Pengaruh Antara jumlah pendidikan Terhadap kemiskinan melalui TPT Sebagai Variabel Intervening.

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah pendidikan dapat berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan dan dapat

juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh pendidikan ke TPT(sebagai variabel intervening) lalu ke Kemiskinan.

- Besarnya pengaruh langsung pendidikan terhadap Kemiskinan(P_1) = - 0.416
- Besar pengaruh tidak langsung pendidikan terhadap Kemiskinan melalui TPT yaitu ($P_2 \times P_3$)(0.441 x 0.305) = 0.1345
- Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi jumlah pendidikan terhadap Kemiskinan melalui TPT (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = -0.416+0.1345= -0.2806
- Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih kecil dari pengaruh tidak langsung.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

jumlah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan melalui TPT sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa TPT menjadi variabel yang memediasi/intervening antara jumlah pendidikan terhadap Kemiskinan maka TPT berfungsi sebagai variabel intervening

B. Pembahasan

1. Pembahasan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara CFA (*COMFIRMATORY FACTOR ANALYSIS*)

Dalam pembahasan CFA yaitu metode Komponen Utama. Dari tabel KMO and Bartlett's Test, di dapat nilai Kaiser Mayer Olkin (KMO) sebesar 0,633 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,5. Nilai ini menandakan data sudah valid untuk dianalisis lebih lanjut dengan Analisis factor. Nilai uji Bartlett sebesar 106.801 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 di bawah 5%, maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas, atau dengan kata lain model faktor yang digunakan sudah baik.

Selanjutnya untuk melihat variabel mana yang memiliki nilai communalities correlation di atas 0,5 atau diatas 50% dapat dilihat pada table communalities berikut ini. Hasil analisis data menunjukkan semakin besar communalities sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel communalities menunjukkan hasil extraction secara individu terdapat lima variabel Tenaga Kerja, PDRB, UMR, Investasi dan pendidikan, yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau 50% yaitu kelayakan selanjutnya harus diuji dengan *variance Explained*.

Berdasarkan hasil total variance explained pada tabel initial Eigenvalues, diketahui bahwa hanya ada 2 komponen variabel yang menjadi factor mempengaruhi kemiskinan. Eigenvalues menunjukkan kepentingan relative masing-masing factor dalam menghitung varianske 7 variabel yang dianalisis. Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya ada tiga faktor yang terbentuk. Karena kedua factor memiliki nilai total angka eigenvalues diatas 1 yakni, sebesar 4,409 untuk factor satu, 1.133 untuk factor dua. Hal ini menunjukkan bahwa dua factor

adalah paling bagus untuk meringkas tujuh variabel tersebut, sehingga proses factoring berhenti pada 2 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya.

Grafik scree plot menunjukkan bahwa dari satu ke dua faktor (garis dari sumbu Component Number = 1 ke 2), arah grafik menurun. Kemudian dari angka 2 ke 3, garis masih menurun. Sedangkan dari angka 3 ke angka 4 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y (Eigenvalues). Hal ini menunjukkan bahwa 2 faktor adalah paling bagus untuk meringkas ketujuh variabel tersebut

Setelah diketahui bahwa dua factor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel Component Matrix menunjukkan distribusi dari tujuh variabel tersebut pada dua faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah factor loadings, yang menunjukkan besar korelasi antar suatu variable dengan faktor 1, faktor 2, . Proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris. Pada tabel component matrix menunjukkan korelasi diatas 0,5. Pada faktor 1 adalah UMR, PDRB, jumlah penduduk, investasi, tenaga kerja. Pada faktor 2 yaitu variabel pendidikan. Selanjutnya melakukan proses factor rotation terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk kedalam factor tertentu.

Component Matrix hasil proses rotasi (Rotated Component Matrix) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa factor loading yang dulunya kecil semakin kecil dan factor loading yang besarsemakin diperbesar, terdapat 2 variabel terpilih pada komponen satu yaitu UMR dan pada komponen dua yaitu pendidikan.

Dari tabel Component Transformation Matrix, terlihat angka-angka yang ada pada diagonal, *ctomponen* 1 dengan 1, *component* 2 dengan 2 terlihat kedua angka di atas 0,5. Hal ini membuktikan kedua factor (component) yang terbentuk sudah tepat, karena mempunyai korelasi yang tinggi. Berdasarkan hasil nilai component matrix diketahui bahwa dari tujuh faktor, maka yang layak untuk mempengaruhi kemiskinan adalah dua faktor yang berasal dari: UMR dan pendidikan

2. PEMBAHASAN PATH ANALYSIS

a. Analisis pengaruh UMR Terhadap Kemiskinan Dengan TPT Menjadi Variabel Intervening.

Hasil analisis data pengaruh UMR terhadap Kemiskinan dengan TPT menjadi variabel intervening menunjukkan UMR signifikan mempengaruhi TPT dan TPT signifikan mempengaruhi kemiskinan. Nilai pengaruh langsung UMR terhadap kemiskinan lebih kecil dari nilai tidak langsung UMR terhadap Kemiskinan dengan TPT. Maka dapat disimpulkan bahwa UMR berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan dengan TPT sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa TPT menjadi variabel yang memediasi antara UMR terhadap Kemiskinan maka TPT berfungsi sebagai variabel intervening. menurut (Yustiana Dwirainaningsih,2018) menyatakan bahwa upah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap kemiskinan adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan kemiskinan, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Hal ini disebabkan oleh, Secara teoritis,

perusahaan hanya akan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitasnya, artinya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah akan menerima upah yang rendah dan sebaliknya. Pada kenyataannya, upah minimum yang ditetapkan lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam penentuan upah (Bappenas (2010:61). Secara nasional sektor primer adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja tetapi mempunyai produktivitas tenaga kerja yang paling rendah yaitu sebesar 0,54, sementara sektor sekunder merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja tetapi mempunyai produktivitas pekerja yang paling tinggi yaitu sebesar 1.82. Kondisi yang sama juga terjadi pada lingkup provinsi di mana produktivitas tenaga kerja di sektor primer adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja di sektor sekunder. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas. Rasio antara UMP dan upah yang diterima pekerja berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa di sebagian besar provinsi, pekerja yang Belum Pernah Sekolah, Belum Tamat SD, dan SD, menerima upah yang lebih rendah dari upah minimum. Hal ini dapat dilihat dari rasio antara UMK dengan rata-rata upah menurut pendidikan yang nilainya lebih besar dari satu (>1). 10 Sementara itu, pekerja yang berpendidikan SLTP ke atas menerima upah yang lebih tinggi dari UMR, yang dapat dilihat dari rasio antara UMR dengan upah menurut pendidikan yang nilainya lebih kecil dari satu. menurut Okta (2013) menyatakan Variabel upah minimum mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Karena bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi di sektor informal, yang notabene

tidak bergantung pada upah minimum.. dalam penelitian ini pendapat penulis mengenai pengaruh UMR terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka, yaitu pengaruh UMR terhadap kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dimana apa bila UMR meningkat akan menurunkan jumlah dari kemiskinan sedangkan pengaruh UMR terhadap TPT memiliki pengaruh yang negatif dimana apa bila UMR naik maka TPT akan mengalami penurunan. Menurut Alkautsar (2014) dalam penelitiannya menyatakan variabel Tingkat upah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat. Kesejahteraan yang meningkat menyebabkan produktivitas kerja meningkat dan keuntungan perusahaan menjadi bertambah. Kenaikan UMR tersebut akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan pula. Penelitian Alghofari (2010) menyatakan bahwa variabel tingkat upah berpengaruh positif mempengaruhi pengangguran di Indonesia. kenaikan besaran tingkat upah akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran, hubungan searah ini disebabkan ketika pemerintah menaikkan upah minimum maka kenaikan penawaran tenaga kerja meningkat, akan tetapi perusahaan lebih memilih mengurangi jumlah pekerja agar tidak mengalami defisit, sehingga pengangguran pun meningkat seiring kenaikan upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Astrini (2013) juga menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Bali. Hal ini berarti meningkatnya pengangguran akan berdampak pada peningkatan presentase penduduk miskin. Dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi

tingkat kemakmuran yang telah dicapai seorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

b. Analisis Pengaruh Tingkat pendidikan Terhadap Kemiskinan Dengan TPT Menjadi Variabel Intervening.

Hasil analisis data pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan dengan TPT menjadi variabel intervening menunjukkan Pendidikan signifikan mempengaruhi TPT dan TPT signifikan mempengaruhi kemiskinan. Nilai pengaruh langsung jumlah pendidikan terhadap Kemiskinan lebih kecil dari nilai tidak langsung pendidikan terhadap Kemiskinan dengan TPT. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan dengan TPT sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa TPT menjadi variabel yang memediasi antara Pendidikan terhadap Kemiskinan maka TPT tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Rio Dhuwi Saputra dan Abdul Karib (2012) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan landasan teori yang dijelaskan oleh Tri Wahyu Rejeki Ningsih (2014), menurutnya pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan adalah elastis. Artinya kenaikan pendidikan akan menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Bertambahnya pendidikan berarti ada tambahan kesempatan kerja, sehingga akan ada permintaan tenaga kerja baru yang meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan adanya Penambahan pendidikan maka perusahaan akan memerlukan penambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi sehingga menimbulkan permintaan akan tenaga kerja yang lebih besar. Dengan adanya penambahan

kesempatan kerja tersebut maka akan menambahkan peluang bagi angkatan kerja yang selalu meningkat di tiap tahunnya. Ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut nantinya akan menyerap angkatan kerja yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Dengan begitu akan mengurangi angka TPT yang selama ini menjadi masalah. Menurut (Andri Normalita 2017) Pendidikan diukur dengan Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari nilai probability sebesar $0,3104 > 0,05$ dengan koefisien sebesar -0.0033427 . Hal ini dikarenakan sektor yang mendominasi di Provinsi DIY yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian yang keduanya tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Selain itu, adanya perbedaan antara pendidikan dan tingkat pekerjaan yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. menurut pendapat penulis pendidikan sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi yang lebih baik, pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan berpengaruh negatif dimana apa bila pendidikan meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan dan hal tersebut juga sama dengan pengaruh pendidikan terhadap tenaga kerja terbuka dimana apa bila pendidikan mengalami peningkatan maka akan menurunkan tingkat pengangguran, hubungan antar tingkat pengangguran terhadap kemiskinan memiliki pengaruh yang positif dimana apa bila pengangguran mengalami penurunan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan pula. Menurut Wiguna (2013) dalam penelitiannya bahwa variabel tingkat pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan meningkatnya pendidikan akan menurunkan angka kemiskinan, dimana pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Seorang yang miskin

mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi. akan tetapi, pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan, orang miskin tidak mempunyai kecukupan dana untuk membiayai pendidikan hingga ketingkat yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan dan universitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan yang diambil dari penelitian mengenai kemiskinan dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Pengujian menggunakan metode CFA terdapat 2 variabel yang terpilih menjadi variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan, variabel tersebut yaitu Upah Minimum Regional, Pendidikan.
2. Uji pengaruh langsung Upah Minimum Regional terhadap kemiskinan lebih kecil dari nilai tidak langsung Upah Minimum Regional terhadap kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Regional berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel intervening.
3. Uji pengaruh langsung pendidikan terhadap kemiskinan lebih kecil dari nilai tidak langsung pendidikan terhadap kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel intervening.

B. SARAN

Ada pun saran yang di buat penulis dalam penelitian ini diantara lain adalah :

1. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera utara, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di waktu yang akan datang dalam upaya meningkatkan pendidikan dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di sumatera utara.
2. Dalam mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di provinsi Sumatera Utara pemerintah hendaknya meningkatkan lapangan usaha dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.
3. Diharapkan bagi pembaca untuk melihat fenomena yang ada di sekitar dan di harpakan ikut serta dalam membuka lapangan pekerjaan, agar adanya kerja sama yang baik yang di bangun oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup yang ada di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2005. *Analisis Investasi*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdurrahman Ginting. 2008. *Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Humaniora
- Abdyanto.2016. *Ekonomi Kemiskinan*.Usu Pres 2016 dicetak di medan. Indonesia
- Amstrong, Thomas. 2001. *Setiap Anak Cerdas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. *Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakeraan (laporan Sosial Indonesia 2007)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2001 – 2017. Badan Pusat Statistik.
- Greene, Pillanueva, 2001, *Intermediate Microeconomic and Its Applications*, 9th Edition, Thomson, Soutwestern
- Harjono K, Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Hasibuan, H. A., Purba, R. B., & Siahaan, A. P. U. (2016). Productivity assessment (performance, motivation, and job training) using profile matching. SSRG Int. J. Econ. and Management Stud, 3(6).
- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. JUMANT, 7(1), 77-84.
- Harahap, R. (2018). ANALISA KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. REZEKI MEDAN. JUMANT, 8(2), 97-102.
- Hureirah, A, 2005, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung
- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia.
- Jhingan, M.L., 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada
- Jihani. 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia* (edisi2). Yogyakarta: BPFE
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Otonomi dan pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mesra, B. (2018). Factors That Influencing Households Income And Its Contribution On Family Income In Hamparan Perak Sub-District, Deli Serdang Regency, North. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(10), 461-469.

- Mhd Habibi Pulungan. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Nanga. Muana, 2001. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.
- Ni Ketut Endrayani. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud).
- Nina, Fitriana, 2008. “ Kaitan Antara Kesempatan Kerja dan Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan*,. Volume 12 Nomor 4.
- Noor Zuhdiyaty (2017), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)*. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya David Kaluge. JIBEKA Volume 11 Nomor 2 Februari 2017: 27 – 31.
- Nopirin. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Makro & Mikro, Edisi ke-1*. Yogyakarta: BPFE.
- Noviyanto Andi Nugroho (2010), *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Rumah Tangga Misikin Di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*. Fakultas ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset
- Prihatini, Ria. 2006. *Hubungan Antara Kebiasaan Jajan dan Pola Aktivitas Fisik Serta Faktor-Faktor Lainnya Dengan Kejadian Obesitas Pada Siswa-Siswi SDIT Darul Abidin Depok 2006*. [Skripsi]. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- Ravi Dwi Wijayanto. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ritonga, Isnayanti Arnah (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provisin Bali. *Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014 Dengan Metode Ordinary Least Square*. *Karismatika*, VOL. 3 NO. 2 AGUSTUS 2017, ISSN : 2443–0366 dan ISSN : 2528 – 0279.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And

Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).

- Rumahorbo, Restuty Anggereny. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rusiadi, Subiantoro N, Hidayat, R. (2014). *Metode Penelitian, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Cetakan Kedua. Medan: USU Press.
- Said, EG dan Intan, AH. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Said, Rusli. 2001 *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D, 2004, *Ilmi Makro Ekonomi*. Jakarta PT. Media Edukasi
- Sari, I. (2018). Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris. *JUMANT*, 9(1), 41-52.
- Sembiring, Rahmad. (2018). Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Pada Masyarakat Desa Pahlawan.
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.14), 309-313.
- Setiawan, N. (2018). PERANAN PERSAINGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional). *JUMANT*, 6(1), 57-63.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI
- Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoenng Deli Medan. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). *JUMANT*, 7(1), 65-76.
- Siregar, N. (2018). ANALISIS PRODUK DAN CITRA KOPERASI TERHADAP WIRAUUSAHA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT DESA LUBUK SABAN PANTAI CERMIN KABUPATEN DELI SERDANG. *JUMANT*, 9(1), 79-93.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA).

Sukirno, Sadono. 2010. *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumarsono, S. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Suryawati. Chriswardani, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol 8/No.03/september/2005. Hal: 121-129.

Todaro M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga

Website:

www.bps.go.id (Situs Resmi Badan Pusat Statistik)

<http://ditpk.Bappenas.go.id/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera>

[Utara](#)